





Laporan Tahunan 2014

Indonesia Climate Change Trust Fund

DAFTAR ISI

Acronyms

Ringkasan Eksekutif

1. Latar Belakang

2. Kemajuan ICCTF Pada Tahun 2014

3. Tantangan dan Respon

4. *Cross-Cutting Issues*

Gender Mainstreaming

Kemitraan

5. Manajemen Risiko

6. Pembelajaran

7. Kesimpulan dan Rencana ke Depan

Kegiatan ICCTF di Media



ACRONYMS

BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BMKG	Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika
BEE	Biomass Energi Estate (Kebun Energi Biomassa)
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DE	Direktur Eksekutif
GHG	Green House Gas
GoI	Government of Indonesia
INDC	Intended Nationally Determined Contributions
Kepmen	Keputusan Menteri
LWA	Lembaga Wali Amanat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MWA	Majelis Wali Amanat
NAMAs	Nationally Appropriate Mitigation Action Programs
UNDP	United Nations Development Programme
RAN-GRK	Rencana Aksi Nasional – Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
RAN-API	Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
REDD+	Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries
SATKER	Satuan Kerja
SGP	Small Grant Programs
SIG	Sistem Informasi Geografis
SOP	Standard Operating Procedure
PDA	Pengelola Dana Amanat
PHSK	Program Hibah Skala Kecil
Permen	Peraturan Menteri
Perpres	Peraturan Presiden

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini mencakup kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 oleh *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) di bawah program "*Preparatory Arrangements for the Indonesia Climate Change Trust Fund* (PREP-ICCTF)", kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan UNDP.

ICCTF bertugas mengkoordinir dan menyalurkan dana untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memastikan bantuan pembangunan yang efektif terkait inisiatif perubahan iklim serta untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

Untuk mendukung pembentukan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) yang dikelola secara nasional dan dapat beroperasi secara penuh, kegiatan PREP - ICCTF berfokus pada: (i) memberikan dukungan terhadap inisiatif prioritas pada penanganan perubahan iklim; (ii) koordinasi dialog kebijakan dan meningkatkan kesadaran terkait perubahan iklim; (iii) mendukung kebutuhan pengembangan kapasitas dan upaya efisiensi serta efektifitas kegiatan ICCTF. Pencapaian utama PREP - ICCTF untuk 2014 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Perubahan Iklim Diseleksi , Dimonitor dan Dievaluasi

ICCTF telah berhasil mendanai enam Program hibah skala kecil (PHSK) dan menyelesaikan pendanaan tiga kegiatan yang bekerja sama dengan tiga Kementerian/Lembaga (K/L) , sehingga menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam penanganan mitigasi & adaptasi perubahan iklim di Indonesia. ICCTF terus mempertahankan standar fidusiari dengan melaksanakan *internal audit independen* (Morrison International) untuk melakukan audit atas aspek keuangan dan administrasi, baik untuk kegiatan Kementerian/Lembaga maupun program hibah skala kecil .

Forum Koordinasi Kebijakan dan Dukungan Kebijakan Pembangunan

Pada tahun 2014 , ICCTF dan Bappenas menyelenggarakan ***ICCTF NAMAs Summit***:

Climate and Development Forum yang bertujuan untuk “menyelaraskan” kegiatan, kebijakan dan program nasional terkait perubahan iklim yang berkelanjutan (NAMAs) dengan kegiatan perubahan iklim internasional dan pendanaan terkait energi bersih yang berasal dari donor internasional dan investor lainnya. Forum ini juga sebagai wahana untuk mempresentasikan kegiatan ICCTF NAMA saat ini (*pipeline program*) dan memaparkan hasil praktik terbaik di bidang pendanaan terkait perubahan iklim. ICCTF menunjukkan peran yang kuat dalam mengkoordinasikan pendanaan perubahan iklim dan bertindak sebagai portal pendanaan untuk menerima dan mendistribusikan dana yang berasal dari mitra pembangunan, dana perubahan iklim (*Green Climate Fund, NAMAs Fasilitas , Adaptation Fund , Efisiensi global Uni Eropa dan Dana Energi Terbarukan, dll*) dan mekanisme pendanaan lainnya.

Persiapan *National Trust Fund*

Pada tahun 2014 yang merupakan tahun terakhir untuk persiapan menuju *National Trust Fund*, terdapat beberapa prestasi yang signifikan telah dicapai selama transisi dari ICCTF menuju dana perwalian yang dikelola secara nasional (Lembaga Wali Amanat), termasuk penerbitan dua Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Pertama, Keputusan Menteri (Kepmen) No.33 / M.PPN / HK / 03 / 2014 tentang Majelis Wali Amanat ICCTF yang telah diterbitkan pada bulan Maret 2014. Pada bulan Oktober 2014, Keputusan ini direvisi untuk mengakomodasi struktur baru pemerintahan Indonesia dan berlakunya peraturan baru, yaitu Kepmen Bappenas / PPN Nomor 97 / M.PPN / HK / 10/2014. Kedua, Peraturan Menteri (Permen) No. 10/2014 yang telah merevisi beberapa klausulnya (misalnya klausul pada struktur ICCTF, klausul tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Pembina, klausul tentang tugas dan tanggung jawab Ketua dan Sekretaris Dewan Wali Amanat / Majelis Wali Amanat) dari Permen sebelumnya yaitu Permen No. 3/2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat ICCTF .



I. Latar Belakang

Perubahan iklim diakui sebagai tantangan besar saat ini. Perubahan iklim memiliki dampak yang sangat buruk pada negara-negara di seluruh dunia, dimana Indonesia sebagai salah satu yang paling parah terkena dampak karena memiliki pulau-pulau yang sangat banyak (sekitar 17.000 pulau), dan penduduknya yang bergantung kepada sumber daya alam. Sebagai hasil dari peningkatan kesadaran tentang dampak perubahan iklim yang ditandai dengan kerentanan tinggi di Indonesia dan emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen yang dibiayai oleh sumber daya sendiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional. Selain upaya-upaya mitigasi yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), terdapat pula Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN - API) yang memberikan pedoman langkah-langkah adaptasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mendukung populasi yang rentan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak yang ditimbulkan. Komitmen ini sejalan dengan visi jangka panjang rencana pembangunan Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan ekonomi rendah karbon.

Untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan dukungan internasional pada kegiatan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia (RI) telah mendirikan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) pada tahun 2009. ICCTF direncanakan akan dikelola secara nasional melalui pembentukan *National Trustee*. Sebelum Lembaga Wali Amanat Nasional didirikan, ICCTF beroperasi di bawah kegiatan "*Preparatory Arrangements for the Indonesia Climate Change Trust Fund* (PREP-ICCTF)", sebuah kegiatan dari Pemerintah Indonesia yang difasilitasi oleh UNDP sebagai pengelola dana interim. Selama periode interim, PREP - ICCTF terus memberikan dukungan dalam bidang sebagai berikut : (1) inisiatif prioritas pada perubahan iklim; (2) Pembentukan/design dari ICCTF dan (3) pengembangan kapasitas dalam upaya efektifitas dan efisiensi kegiatan ICCTF.

II. Kemajuan ICCTF Pada Tahun 2014



I. Implementasi Kegiatan

Ringkasan

Pada tahun 2014, kegiatan utama ICCTF yaitu melanjutkan pendanaan dan monitoring kegiatan – kegiatan yang telah didanai, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Selain itu, ICCTF juga memfokuskan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (i) melakukan *Call for Proposal* untuk program hibah skala kecil yang

dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil dan universitas; (ii) memilih enam proposal hibah skala kecil dan melakukan pendanaan kegiatan; (iii) melakukan pengawasan baik terkait dengan pemrograman dan finansial kegiatan. Pada kuartal keempat 2014, ICCTF juga mensupervisi penyelesaian tiga *funded projects* yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga dan penyelesaian enam program hibah skala kecil (PHSK).

Progress

1.1 Funded Projects

Pada tahun 2014, ICCTF terus melakukan supervisi dan pengawasan terhadap tiga *funded projects* yang dilaksanakan oleh kementerian sebagai berikut : (i)Kementerian Pertanian ; (ii) Kementerian Kesehatan ; dan (iii) Kementerian Kehutanan

Kementerian Pertanian



Kegiatan “Penelitian Pengelolaan Berkelanjutan Lahan Gambut Terdegradasi untuk Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Mengoptimalkan Produktivitas Tanaman” bertujuan untuk meningkatkan model pengelolaan yang berkelanjutan dari lahan gambut yang terdegradasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengoptimalkan produktivitas tanaman. Kegiatan ini difokuskan pada daerah-daerah di Papua, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah, yang merupakan kelanjutan dari

kegiatan sebelumnya yang didukung oleh ICCTF selama tahun 2010-2012.

Output dari kegiatan ini meliputi: (i) peta Ilmiah dan komprehensif lahan gambut terdegradasi di Sumatera, Kalimantan dan Papua (skala 1 : 250.000) serta kabupaten terpilih (skala 1: 50.000); (ii) Sebuah model strategi dan model pengelolaan yang berkelanjutan dari lahan gambut yang terdegradasi untuk mitigasi emisi GRK dan optimalisasi produksi tanaman; (iii) Peningkatan dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, dan kemampuan riset, manajemen dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) dari lahan gambut ; (iv) rekomendasi kebijakan dan pedoman pengelolaan berkelanjutan lahan gambut terdegradasi berdasarkan pertimbangan sosial - ekonomi dan lingkungan; (v) Publikasi dan pengembangan jejaring (*networking*) antara lembaga penelitian nasional maupun internasional, pembuat kebijakan, perguruan tinggi/universitas , kelompok tani dan LSM.

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang terdiri dari teori dan praktek lapangan serta latihan perhitungan, analisis dan interpretasi data serta presentasi oleh peserta pelatihan. Materi pelatihan meliputi : (i) pengelolaan berkelanjutan lahan gambut ; (ii) prinsip-prinsip perubahan iklim; (iii) pengukuran cadangan karbon di lahan gambut dan vegetasi; (iv) pengukuran emisi gas rumah kaca di lahan gambut dengan Gas Chromatography; (iv) Pengukuran emisi gas rumah kaca di lahan gambut dengan gas analyzer inframerah (IRGA); (vi) Penggunaan sistem otomatis cuaca (AWS) dan pengukuran piezometer; (vii) estimasi emisi GRK dari sektor pertanian dan perubahan tata guna lahan. Pelatihan telah dilakukan di lima provinsi yaitu Kalimantan Barat, Papua, Jambi, Riau dan Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta di setiap provinsi sekitar 22-32 orang.

Kegiatan ini telah berhasil memperluas jaringan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) dengan masyarakat, lembaga nasional dan internasional serta para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub - nasional. Hasil penelitian telah dan akan dikomunikasikan dan disosialisasikan di tingkat nasional dan internasional serta diterbitkan dalam catatan proses, buku, ringkasan kebijakan, pedoman dan selebaran. Beberapa naskah akan ditulis ulang dalam jurnal peer-review nasional dan internasional untuk meningkatkan visibilitas dan berkontribusi terhadap literatur ilmiah .

Laporan kemajuan kegiatan Kementan - CCTF tersedia di www.icctf.litbang.deptan.go.id

Ministry of Health

Kegiatan “Kajian Kerentanan Akibat Perubahan Iklim: Penilaian, Pemetaan, dan Adaptasi Berbasis Masyarakat Pada Demam Berdarah Dengue (BDB) dan



Malaria” membahas masalah perubahan pola pada Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Malaria yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

Kegiatan ini telah menghasilkan output yang saling terkait: (i) Model DBD dan insiden Malaria

terkait dengan proyeksi perubahan iklim dilengkapi dengan peta distribusi penyakit yang dikembangkan untuk masing-masing 21 kota / kabupaten di 5 provinsi : Sumatera Barat , DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Tengah; (ii) Peningkatan kesadaran petugas kesehatan dan pembuat kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten tentang pengaruh perubahan iklim terhadap pola DBD dan Malaria di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Bali; (iii) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan masyarakat untuk mengembangkan strategi adaptasi sebagai respon dari perubahan pola penyakit DBD dan Malaria akibat perubahan iklim di Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Timur.

Kegiatan ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi dampak perubahan iklim pada sektor kesehatan terutama dengan distribusi pola DBD dan Malaria. Model dan peta proyeksi kerentanan kesehatan terhadap DBD dan Malaria akibat perubahan iklim di 5 provinsi dapat direplikasi untuk provinsi lain dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal. Pemerintah daerah akan terus melaksanakan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disusun melalui pendanaan oleh sumber-sumber keuangan lokal (APBD) dan juga dengan dukungan dari sektor swasta serta masyarakat sendiri.



Kegiatan ICCTF – Kementerian Kehutanan bertujuan untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan produksi pelet kayu berbasis masyarakat sebagai energi biomassa. Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung ekonomi rendah karbon dan mitigasi dampak perubahan iklim di Kabupaten Bangkalan Madura .

Output dari kegiatan ini termasuk :

- Pertama, kegiatan ini telah berhasil membangun *demonstrasi plot (demplot)* sebagai kebun energi biomassa/*Biomass Energi Estate* (BEE) untuk memasok inkubator pelet kayu. Demplot memiliki luasan sebesar 214 hektar yang telah ditanami kaliandra dan siap untuk memasok bahan baku pelet kayu serta karbon yang tersimpan dalam bentuk biomassa kayu
- Kedua, pengukuran emisi CO₂ bersih yang terserap dalam kebun energi dan emisi CO₂ bersih digantikan oleh produk *wood pellet*. Pemanenan kaliandra dimulai Mei 2014 (14 – bulan usia dari kaliandra). Berdasarkan perhitungan penyerapan karbon di kebun energi yang ada , pengurangan emisi yang diperkirakan pada BEE dari kaliandra adalah 69,69 ton CO₂eq / ha / tahun (emisi BEE) - 22,02 ton CO₂eq / ha / tahun (emisi hutan rakyat yang terletak di UPH) = 47,67 ton CO₂eq / ha / tahun.
- Ketiga, pengembangan model bisnis, entitas dan inkubator untuk industri pelet kayu. Pabrik dengan luas bangunan 200 m² dan koneksi listrik sebesar 197 kilowatt, telah memproduksi pelet kayu berkualitas baik. Penguatan sebuah organisasi pengelola hutan berbasis masyarakat yang disebut “Kelompok Tani KPH Gerbang Lestari” yang terdiri dari 10 kelompok tani masyarakat dan telah menyusun semua persyaratan hukum, termasuk : Ijin pendirian pabrik, ijin hukum, dan dokumentasi lain yang diperlukan untuk mengoperasikan inkubator bisnis ini. Sampai dengan akhir kegiatan, dibawah pengelolaan CV Gerbang Lestari telah menghasilkan pelet kayu dan telah disimpan di gudang produksi sebanyak 12 ton.
- Keempat, kapasitas kelembagaan masyarakat ditingkatkan melalui sumber pendapatan alternatif bagi petani. Kegiatan ini juga melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan petani melalui program pelatihan, *Focus Group Discussion* (FGD), dan bantuan teknis. Para petani dan pekerja pabrik diberi akses ke pendidikan, pelatihan manajemen, dan mesin pengolahan serta mereka juga telah mampu mengembangkan pengetahuan untuk produksi pelet kayu.

1.2 Program hibah Skala Kecil (SGPs)



Pada tanggal 20 Januari 2014, ICCTF mengumumkan *Call for Proposals* untuk Program Hibah Skala Kecil (PHSK). Organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian non - pemerintah dan perguruan tinggi / akademi diundang oleh ICCTF untuk mengajukan proposal kegiatan. Anggaran yang diusulkan untuk proposal yang akan didanai adalah sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Penilaian dilakukan melalui tinjauan dokumen dan wawancara langsung dengan perwakilan dari pemrakarsa kegiatan. Sebelum batas waktu yang ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2014, ICCTF menerima 196 proposal. Secara umum proses seleksi *Small Grant Programs* (SGP) diikuti tiga tahap seperti yang disajikan di bawah ini.

Tahap 1:

Seleksi administrasi dan kriteria umum oleh Sekretariat ICCTF. Tahap ini menghasilkan 15 proposal berbasis lahan; 34 proposal yang berkaitan dengan Energi; 31 proposal yang berkaitan dengan Kerentanan dan Adaptasi

Tahap 2:

Review dilakukan oleh tiga independent experts di windows Land-based Mitigation, Energy, Resilience & Adaptation yang menghasilkan enam proposal Mitigasi Tanah berbasis ; enam proposal Energi dan enam proposal yang berkaitan dengan Ketahanan dan Adaptasi .

Tahap 3:

In-depth Assesment yang dilakukan oleh Panelist Experts di setiap Window. Tahap ini menghasilkan tiga (3) proposal di setiap window. Sebanyak 9 proposal yang disampaikan kepada Rapat Tim Pengarah pada tanggal 24 Maret 2014 dan enam proposal yang didanai .

Detail pelaksanaan 6 (enam) kegiatan small grant programs(SGP) dijelaskan sebagai berikut:

1 Peningkatan Serapan Karbon di Hutan Rakyat

(Mitra: ARUPA)

Output 1 : Neraca/Laporan cadangan karbon di Desa Terong

Di bawah output 1, kegiatan telah menyelesaikan laporan/neraca yang berisi informasi tentang cadangan karbon hutan rakyat pada tahun 2014 di desa Terong. Pada tahun 2014, hasil perhitungan yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa cadangan karbon hutan 78,97 ton per hektar di tegalan rumah dan 49,87 ton per hektar di lahan kering.

Selain neraca stok karbon, ARUPA juga menghasilkan modul untuk mengukur cadangan karbon hutan rakyat yang diharapkan menjadi alat perhitungan karbon untuk fasilitator atau petugas penyuluh lapangan (PPL). Modul ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan kemampuan desa untuk melakukan perhitungan karbon secara mandiri.

Output 2 : Penambahan cadangan karbon pada hutan rakyat

Penanaman kurang lebih 4.725 pohon kayu jati dan lebih dari 1.600 pohon durian untuk meningkatkan stok karbon sebagaimana permintaan dari warga desa, dimana kedepannya desi ini akan dipromosikan sebagai Desa Wisata. Kegiatan dimulai dengan penyiapan bibit, kemudian mulai distribusi bibit tanaman, kemudian ke perawatan tananam yang seluruhnya dilakukan oleh anggota Hutan Rakyat 'Komunitas Tani Hutan (KTH) Jasema'. Dari penanaman pohon jati sebanyak 4.725 pohon, dengan asumsi 80 % kayu jati akan tumbuh besar, maka diperkirakan pada 2034 sebanyak 493,960 ton karbon akan diserap. Bibit yang dibagikan kepada seluruh anggota KTH Jasema (554 keluarga) ditanam pada luasan tanah 312.32 hektar

Output 3 : Lembaga Keuangan Mikro – Koperasi Tunda Tebang

ICCTF dan ARUPA telah menyelesaikan pembentukan lembaga keuangan mikro dalam bentuk koperasi yang disebut ' Koperasi Tunda Tebang (KTT) ' di Desa Terong Desa. Prosedur administrasi untuk mendirikan koperasi telah selesai dan dokumen hukum koperasi telah difinalisasi. Pada tanggal 11 November 2014, KTT diluncurkan oleh Wakil kepala Daerah Kabupaten Bantul dan Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas.



Dengan berdirinya Koperasi Tunda Tebang (KTT), pada tahun pertama telah mengumpulkan modal awal sebesar 78 juta rupiah dari para anggotanya. KTT ini diharapkan dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan tanaman kayu jati sebagai jaminan. Kayu jati yang dijadikan sebagai jaminan harus memenuhi beberapa persyaratan seperti: volume pohon lebih besar, usia pohon sudah cukup tua. Dengan demikian, masyarakat terus menjaga penyerapan karbon hutan dan hutan akan mampu menyimpan karbon selama mungkin di hutan rakyat. Dengan modal awal, maka diperkirakan pada 2021 KTT akan mempertahankan cadangan karbon hutan sebanyak 29.40 ton.

Output 4 : Rencana Pengelolaan Hutan untuk Masyarakat Berbasis Masyarakat

Dokumen rencana pengelolaan hutan rakyat terdiri dari tiga jenis kegiatan : silvikultur, ekologi dan sosial. Kegiatan silvikultur termasuk penyiapan persediaan, persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan, dan penebangan/pemanenan. Kegiatan ekologi terdiri dari rencana lokasi bernilai konservasi tinggi. Rencana pengelolaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengelola hutan rakyat di mana Komunitas Tani Hutan (KTH) Jasema telah menerima sertifikasi untuk melegalkan kayu, sehingga pengelolaan hutan rakyat dapat dilestarikan.

Output 5 : Draft kebijakan untuk Mengakomodir Hutan Rakyat sebagai Bagian Dari Tata Ruang

Draft kebijakan rencana pengelolaan lingkungan dan pemukiman akan digunakan oleh pemerintah desa dalam perencanaan desa. Pengaturan ini mencakup rencana pengelolaan kawasan lindung (hutan lindung, perlindungan mata air dan perlindungan sungai); Rencana pengelolaan kawasan pertanian; rencana pengelolaan dan pelestarian Hutan Rakyat; rencana pembangunan permukiman; pengembangan perdagangan zona - jasa dan zona perkantoran. Terkait dengan mitigasi perubahan iklim, Desa Terong dalam draft ini memasukkan luasan hutan rakyat 668.842 hektar di 9 pedukuhan. Daerah hutan masyarakat akan dipertahankan secara ekologis dan ekonomis.

2 Model Public Private- Partnership dalam Mengatasi Degradasi dan Deforestasi Hutan

(Mitra: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor)



Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan model hubungan antara pengurangan emisi, deforestasi dan model kemitraan publik-swasta dalam mitigasi perubahan iklim serta modul pertanian iklim-pintar untuk pembangunan kapasitas masyarakat lokal. *Public Private Partnership* Model mengatasi Degradasi Hutan dan Deforestasi di Biosfer Giam Siak yang dilaksanakan oleh fakultas kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Output 1 : Model hubungan antara penyebab deforestasi dan emisi Gas Rumah Kaca

Dalam rangka mengembangkan model hubungan antara deforestasi dan emisi gas rumah kaca, sampling dan analisis emisi gas rumah kaca dan analisis spasial berbagai tutupan lahan telah dilakukan. Setelah menganalisis data, model hubungan antara deforestasi dan emisi gas rumah kaca dikembangkan. Deforestasi melepaskan CO₂ yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki tutupan lahan, diikuti oleh minyak sawit dengan tanaman tahunan. Perhitungan menunjukkan bahwa satu hektar deforestasi di cagar biosfer ini akan meningkatkan emisi CO₂ sebanyak 1.545 ton. Dan satu hektar kawasan yang direboisasi akan mengurangi emisi CO₂ sebesar 456 ton. Data saat ini menunjukkan bahwa dengan reboisasi dari semua bidang deforestasi di cagar biosfer akan mampu menyerap jumlah emisi karbon yang sudah dilepaskan. Ini adalah sebuah terobosan untuk menghentikan deforestasi dan mencegah kebakaran di masa depan.

Output 2 : Suatu model kemitraan Publik-Swasta (*public-private partnership*) dalam upaya mitigasi perubahan iklim

Focus Group Discussion (FGD) yang baru ini dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan termasuk Perusahaan Sinar Mas dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bertujuan untuk mengembangkan model untuk kemitraan swasta publik dalam kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim. Sebuah model kemitraan publik-swasta yang terdiri dari sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, Organisasi Masyarakat Sipil, pemerintah daerah, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), lembaga penelitian dan masyarakat. Peserta FGD sepakat untuk mengelola Cagar Alam Biosfer



untuk tujuan berikut : (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) keberlanjutan bisnis komunitas; (iii) keberlanjutan ekosistem hutan / gambut; (iv) peningkatan sumber daya manusia.

Pengelolaan cagar biosfer sudah ada, tapi kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih dalam manajemen diperlukan, terutama dari para stakeholder yang berperan

dalam deforestasi dan degradasi hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membakar hutan dilakukan untuk membersihkan lahan untuk pertanian. Pendidikan pertanian yang berkelanjutan dan konservasi bagi masyarakat setempat diperlukan untuk menghentikan deforestasi, degradasi hutan dan kebakaran hutan. Penelitian ini juga menyediakan kriteria dan indikator untuk pengelolaan dan kemitraan cagar biosfer yang lebih baik.

Output 3 : Modul *Climate Smart Agriculture* (CSA)

Sebuah modul CSA dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. CSA merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi deforestasi, degradasi hutan, dan emisi gas rumah kaca dengan mengembangkan alternatif untuk upaya masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di cagar biosfer. Modul ini meliputi beragam topik seperti: gambaran masalah pembangunan pertanian di lokasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu (GSK – BB), informasi tentang potensi komoditi di daerah transisi dari Cagar Biosfer dan informasi di pengembangan komoditas berpedoman CSA. Target audiens untuk modul ini adalah petugas penyuluh lapangan. Kegiatan ini akan melanjutkan pengembangan modul untuk *demonstration plot* (*demplot*) CSA untuk desa-desa percontohan yang terpilih dengan menggunakan komoditas yang berbeda untuk membuat modul yang lebih operasional dan praktis bagi petani.

CSA bertujuan untuk memilih tanaman yang tepat atau tanaman pertanian serta metode pertanian yang tepat. Beberapa tanaman yang lebih menguntungkan dari minyak sawit namun memancarkan sedikit CO₂. Bahkan jika petani memilih kelapa sawit sebagai tanaman mereka namun dapat menggunakan metode yang tepat untuk pertanian di lahan gambut seperti Cagar Biosfer GSK yang menghasilkan emisi lebih rendah daripada praktik pertanian yang konvensional.

3

Planning and Information System for Street Lighting Energy Efficiency

(Mitra: Politeknik ATMI Surakarta)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi geografis (SIG) penerangan jalan umum (PJU) yang hemat energi. Cakupan geografis untuk kegiatan ini : Kota Surakarta, Jawa Tengah

Output 1 : Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) dari Penerangan Jalan Umum (PJU) / Lampu Jalan di Kota Surakarta

Sistem ini dibangun berbasis web dengan menggunakan basis peta Surakarta dari Open Street Map (<http://www.openstreetmap.org>). SIG PJU Kota Surakarta dapat diakses dengan

menggunakan perangkat komputer ataupun *handset*. Sistem ini membutuhkan koneksi internet agar dapat memunculkan peta. Sistem ini memiliki keuntungan sebagai berikut: (i) membantu operator jalan umum dalam melakukan perekaman dan pemantauan mulai dari identitas, lokasi (bujur - lintang) titik PJU, alamat, jenis, kondisi, durasi biaya api, pengadaan dan pemeliharaan dan lainnya; (ii) memungkinkan operator melakukan perencanaan kegiatan yang terkait dengan PJU. Operator juga dapat dengan mudah membuat berbagai skenario. Bidang yang dapat dimasukkan dalam skenario adalah penentuan daerah PJU, pemilihan jenis teknologi pencahayaan, penentuan tarif abonemen atau meter, investasi meterisasi dan lampu serta komponen lainnya; (iii) SIG PJU juga dilengkapi dengan laporan yang mampu menyajikan hasil perhitungan skenario. Isi laporan SIG yang disajikan antara lain konsumsi energi, biaya, dan perhitungan emisi karbon.

Output 2 : Satu dokumen Usulan Rencana Induk Efisiensi Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta

ATMI Surakarta telah mengembangkan panduan Perencanaan Efisiensi Penerangan Jalan Umum : Studi Kasus (PJU) yang terletak di Jalan Kanayatan, Joyotakan, Surakarta. Panduan tersebut sebagai pengganti dokumen Usulan Rencana Induk Efisiensi Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta. Panduan ini juga sebagai dokumentasi sebuah studi kasus skenario meterisasi Penerangan Jalan Umum di Jl. Kanayan 1, Joyotakan,



Surakarta. Modul ini menjelaskan secara singkat tentang standar yang dipakai dalam menentukan pilihan lampu dan perhitungan. Skenario-skenario tersebut merupakan kombinasi dari pengambilan usaha efisiensi berupa penggantian lampu dan atau melakukan meterisasi. Bagian akhir buku akan ditampilkan grafik perbandingan keseluruhan *Ownership Cost* dan *Total CO2 Equivalent Emission*.

Output 3: Percontohan penerapan SIG pada PJU di Kampus Politeknik ATMI Surakarta

Telah dilakukan penerapan SIG pada PJU di Kampus Politeknik ATMI Surakarta. Percontohan ini dipasang pada ruas Jalan Duwet Raya (jalan lokal), kelurahan Karangasem, kecamatan Laweyan, Surakarta. Sebelum dilakukan percontohan, lampu yang terpasang adalah lampu pelepas gas tornado 80 watt. Ada dua tipe lampu yang digunakan

sebagai percontohan yaitu lampu LED bertenaga surya dan lampu LVD (induksi). Kedua lampu tersebut mewakili lampu PJU yang berteknologi hemat energi dan efisiensi pencahayaan tinggi. Diadakan tiga set PJU untuk tiap tipe lampu, sehingga total ada tiga LED tenaga surya dan tiga LVD.

Output 4 : Operator dan perencana PJU Kota Surakarta mampu mengoperasikan dan mengembangkan PJU yang efisien

ATMI Surakarta telah menyelesaikan pelatihan untuk staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) bagaimana mengefisienkan PJU dan mengoperasikan Sistem Informasi Geografis PJU Kota Surakarta. Peserta terdiri dari lima staf DKP Kota Surakarta bidang PJU, dua staf PLN Area Surakarta, dua staf BLH Surakarta, satu staf Bappeda dan dua dosen Politeknik ATMI Surakarta. Melalui pelatihan ini, peserta mampu memahami dasar perhitungan konsumsi energi listrik, penentuan emisi gas rumah kaca, peluang efisiensi PJU dari meterisasi dan teknologi PJU hemat energi.



4 Adaptasi Budidaya Rumput Laut

(Mitra: Humaniora, Kendari, Sulawesi Tenggara).

Kegiatan Adaptasi Budidaya Rumput Laut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal tentang budidaya rumput laut dan memperkenalkan varietas baru rumput laut yang dapat beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Humaniora di Pulau Toba dan Renda, Sulawesi Tenggara. Cakupan geografis untuk kegiatan ini : Pulau Toba dan Pulau Renda , Kabupaten Muna.

Ouput 1: Tersosialisasinya pengetahuan tentang hubungan produksi rumput laut dan kondisi cuaca serta metode dan tekhnologi budidaya rumput laut yang lebih baik kepada pembudidaya rumput laut di pulau Toba dan pulau Renda

Informasi disosialisasikan meliputi efek dari variasi iklim terhadap budidaya rumput laut serta metode adaptasi dan teknologi untuk masyarakat di pulau Renda, Wangkolabu, Toba Pulau Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kegiatan sosialisasi ini juga melibatkan Tenaga Ahli dari Kantor Balai Perencanaan Teknologi Kelautan (BPTK) Wakatobi serta Institut Penelitian dan Pengembangan Rumput Laut Gorontalo. Selain itu, Humaniora juga mengembangkan percontohan budidaya rumput laut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi budidaya rumput laut. Panen pertama dilakukan pada awal Oktober 2014. "Kebun Percontohan" yang bertujuan untuk memperkenalkan benih rumput laut dari daerah lain serta mengidentifikasi faktor-





faktor penyebab yang mempengaruhi keberhasilan budidaya rumput laut. Selain itu, Humaniora juga menyelesaikan serangkaian diskusi dengan masyarakat setempat dan ahli rumput laut, ahli iklim laut dan lembaga penyuluhan setempat seperti Departemen Kelautan dan Perikanan terkait pengaruh variasi musiman dalam budidaya rumput laut serta penerapan metode adaptasi dan teknologi pada rumput laut.

Output 2: Percontohan budidaya rumput laut dengan metode baru dan teknologi baru serta varietas rumput laut yang lebih toleran variasi iklim

Kegiatan ini mengembangkan pedoman untuk *demonstration plot* (*demplot*) untuk petani dan mengembangkan pedoman untuk pemantauan *demplot* yang diperuntukan bagi fasilitator lokal/pendamping. Selain itu, pelatihan bagi fasilitator lokal dan petani telah selesai diselenggarakan, diikuti dengan pengembangan *demplot* di dua lokasi yang dipilih dengan menggunakan metode dan teknologi baru, varietas rumput laut baru yang lebih toleran terhadap perubahan cuaca.

Output 3: Analisa hasil budidaya rumput laut dengan metode baru dan teknologi baru serta varietas rumput laut yang lebih toleran variasi iklim

Humaniora telah mengembangkan model budidaya rumput laut dengan menggunakan metode baru dan teknologi serta varietas baru yang lebih toleran dengan variasi iklim. Kegiatan lain yang dilakukan termasuk diskusi rutin dengan para peserta percontohan *demplot* dan fasilitator lokal mengenai hasil budidaya pertanian/rumput laut serta diskusi dengan pakar rumput laut terkait dengan pelaksanaan budidaya rumput laut. Salah satu output utama dari kegiatan ini adalah produksi video dokumenter yang berisi tahapan budidaya rumput laut, kegiatan sosialisasi dan *demplot*.



5 Penguatan Sistem Informasi Iklim bagi Petani dan Nelayan di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang

(Partner: Yayasan PIKUL, Kupang)

Kegiatan ini telah sukses membangun sistem penyebaran informasi melalui operator, yang dikompilasi dari sumber informasi cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG, www.maritim.bmkg.go.id), Kalender Tanam Terpadu (Katam, www.katam.deptan.go.id), Badan Penelitian dan Observasi Samudera (BPOL, www.bpol.kkp.go.id) , SI - Mail (pdpt-kkp.org) dan

sumber lainnya. Informasi ini kemudian 'diterjemahkan' menjadi pesan teks yang akan didistribusikan ke sekitar 1.000 petani dan nelayan di Kota Kupang dan Kabupaten.

Output 1: Petani dan nelayan memahami dan tertarik untuk mengetahui serta mendapatkan informasi tentang iklim sebagai bahan mengambil keputusan dalam usaha pertanian maupun keputusan untuk pergi menangkap ikan

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai output ini, termasuk: (i) penyebaran informasi kepada 500 nelayan dan petani terkait cuaca dan iklim melalui pesan singkat (SMS), 16 kali dalam durasi enam bulan diperuntukkan bagi petani; 120 kali dalam 4 bulan untuk nelayan; (ii) menyelesaikan penilaian kebutuhan informasi iklim dan cuaca untuk petani dan nelayan yang dilakukan Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; (iii) mengadakan lokakarya untuk mengembangkan sistem iklim dan informasi cuaca dengan mengundang *stakeholder* pemerintah yang lebih luas di Kupang. Selain itu, Yayasan Pikul





juga melakukan dua kali pelatihan tentang informasi yang berkaitan dengan iklim dan cuaca untuk Petani penyuluh Lapangan (PPL) dan ketua kelompok tani serta nelayan (2 kali untuk petani, 2 kali untuk nelayan, termasuk petani rumput laut), menyusun dan mengembangkan “Modul Siap Pakai” yang berisi tentang Sistem Diseminasi Informasi Iklim dan manual untuk memantau respon dari petani dan nelayan. Untuk kebutuhan diseminasi informasi cuaca, Perkumpulan Pikul memproduksi dan mendistribusikan 500 lembar poster informasi pemantauan respon bagi petani dan nelayan.

Output 2: SKPD terkait (BMKG, Badan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, Dewan Ketahanan Pangan) membangun rencana pengembangan sistem diseminasi informasi berkala untuk petani dan nelayan

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan lokal yang relevan dalam memberikan informasi periode iklim terhadap nelayan dan petani, Yayasan Pikul telah menyusun laporan pembelajaran tentang sistem informasi dan juga mengembangkan modul untuk memungkinkan petani menerjemahkan dan menafsirkan dengan mudah tentang cuaca dan informasi iklim.

Output 3: Media massa membangun rencana partisipasi dalam informasi cuaca dan iklim kepada petani dan nelayan

Keterlibatan media dalam memberikan informasi mengenai cuaca dan iklim sangat penting. Dengan tujuan untuk merangkul media lokal, Yayasan Pikul menyelenggarakan pelatihan bagi wartawan dan media massa. Selain itu Yayasan Pikul juga menghasilkan laporan penilaian tindak lanjut pada kebutuhan informasi bagi petani di Kabupaten Kupang, mengembangkan laporan lokakarya yang berisi tentang pelajaran dalam mengembangkan sistem informasi iklim dan cuaca. Selain itu, Yayasan Pikul menghasilkan laporan pemantauan penggunaan informasi oleh petani dan nelayan (5 petani dan 5 nelayan menggunakan metode sampling).



6 Penguatan Peningkatan Komunitas Masyarakat Pesisir Melalui Teknologi Multimedia Partisipatif

(Mitra: Perkumpulan Bingkai Indonesia, Yogyakarta)

Kegiatan yang disebut Penguatan Ketahanan Komunitas Masyarakat Pesisir melalui Teknologi Multimedia Partisipatif yang dilaksanakan di empat provinsi di Indonesia oleh Perkumpulan Bingkai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi mengenai iklim untuk masyarakat nelayan di empat provinsi : Yogyakarta, Jawa Barat, Banten dan Sulawesi Utara.

Output 1: Informasi prakiraan cuaca harian diterima oleh nelayan 8 komunitas di 4 provinsi selama 3 bulan melalui pesan singkat (sms)

Terkait dengan output 1, Perkumpulan Bingkai telah menghasilkan beberapa keluaran meliputi: (i) sosialisasi di delapan daerah yang dipilih dan menyelesaikan pemilihan fasilitator masyarakat di bulan September 2014; (ii) penyebaran SMS ke nelayan di delapan komunitas di empat provinsi. Jumlah nelayan penerima sms pada tiga bulan pertama sebanyak 148 orang. Sangehe, Sulawesi Utara sebanyak 32 orang, Ujung Kulon sebanyak 15 orang, Palabuhan Ratu sebanyak 20 orang dan dari Yogyakarta sebanyak 81 orang. Dari penerima sms yang mendapatkan informasi secara terus menerus - informasi selanjutnya disebarkan melalui penerusan sms maupun informasi dari mulut ke mulut. Sebelum penyebaran SMS pada perkiraan cuaca, Perkumpulan Bingkai menyelenggarakan lokakarya pada pertengahan Juli 2014 di Yogyakarta yang menargetkan fasilitator lokal untuk mengajarkan mereka bagaimana mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan prakiraan cuaca. Sebanyak 31 nelayan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Output 2: Panduan praktis pengambilan dan penerusan informasi prakiraan cuaca dan lokasi potensi ikan serta panduan pemantauan tanggapan nelayan bagi pendamping

Panduan praktis ini disusun oleh Perkumpulan Bingkai berdasarkan pembelajaran kegiatan sejenis sebelumnya. Para pelaku kegiatan tersebut selanjutnya dilibatkan sebagai tim penulis sekaligus menjadi pelatih dalam ToF (*Training of Facilitator*). Sehingga berbagai informasi, baik pengetahuan maupun pengalaman dapat terserap melalui proses penulisan buku dan pelatihan. Buku saku dicetak dan perbanyak sejumlah 500 eksemplar dan dibagikan kepada nelayan di 8 wilayah serta pemangku kepentingan

lainnya. Buku saku kini telah menjadi pedoman bagi nelayan lokal untuk mengakses dan mengelola informasi dari BMKG serta informasi potensi tangkapan ikan. Buku saku Juga berfungsi sebagai referensi untuk pihak lainnya seperti Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan LSM lokal serta nelayan muda.



Output 3: Pelembagaan mekanisme kerja jangka panjang pengambilan dan penerusan informasi prakiraan cuaca harian pada kelompok nelayan di 8 komunitas dari 4 provinsi

Penguatan kelompok pemuda dan nelayan potensial telah dilaksanakan di 8 wilayah. Pelembagaan ini masih belum seratus persen selesai dilakukan karena terbatasnya waktu kegiatan. Kelompok nelayan belum menyusun rencana aksi sebagai bentuk pengelolaan tindak lanjut paska kegiatan berakhir. Demikian juga kegiatan yang menghubungkan antara kelompok nelayan dengan pemangku kepentingan – khususnya pemerintah daerah masih belum terlaksana.

Kedua kegiatan yang saling terkait ini menjadi catatan tersendiri bagi Bingkai Indonesia dan berkomitmen dengan komunitas nelayan wilayah kegiatan untuk tetap melakukannya. Audiensi dengan SKPD terkait atau *public hearing* dengan legislatif akan dilakukan setelah komunitas menyusun rencana aksi dan pembuatan film selesai dilakukan. Dari komunikasi untuk komunitas, kegiatan tersebut akan dilakukan paling lambat pada bulan Januari 2015.

Output 4: Dokumentasi visual dasar proses kegiatan dan pembelajaran kegiatan program

Pendokumenasian audio visual, baik berupa foto maupun *footage* film video menjadi bagian dari proses pelaksanaan kegiatan. Saat ini telah terkumpul dokumen berupa foto, baik dokumentasi proses kegiatan, aktifitas nelayan maupun *landscape* lokasi kegiatan. Demikian juga dengan *footage* film sebagai bahan dasar pembuatan film.

Secara internal –Bingkai Indonesia juga menyusun film pendek untuk mendokumentasikan potret perjalanan kegiatan penerusan informasi cuaca dan potensi ikan. Film ini juga akan menjadi modal bagi komunitas dalam membangun strategi keberlanjutan. Melalui film yang diproduksi dengan menggambarkan tujuan, *outcome*, *output* maupun aktifitas yang menjawab kebutuhan nelayan atas informasi dan potensi ikan - dapat dengan mudah ditangkap oleh pemangku kepentingan, khususnya pemerinah daerah maupun legislatif untuk mendukung upaya yang telah ada di komunitas. Bentuk dukungan adalah memperkuat kelompok nelayan dan memastikan informasi prakiraan dan potensi ikan dapat terus diterima oleh nelayan.

Kontribusi Untuk Hasil Jangka Panjang

Untuk memenuhi mekanisme *fiduciary* standar dan jaminan kualitas serta melengkapi kegiatan monitoring dan evaluasi, ICCTF menunjuk Morisson International sebagai auditor internal ICCTF. Selama Tahun 2014 Program Hibah Skala Kecil dengan fokus pada LSM dan perguruan tinggi sebagai Badan Pelaksana telah menjadi prioritas ICCTF. Di masa depan, ICCTF bekerja sama dengan lembaga lainnya melalui pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akan diperluas.

2. Komunikasi dan Outreach



Ringkasan

Pada tahun 2014, ICCTF melakukan beberapa kegiatan komunikasi dan outreach baik di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan tersebut antara lain, **'Adopsi Coral dengan Anak Sekolah'** pada bulan Agustus 2014, juga termasuk roadshow ke sekolah-sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak sekolah tentang perubahan iklim yang bekerjasama dengan organisasi lokal, dua kali kunjungan donor dan media untuk *funded project* dan program hibah skala kecil (PHSK), ICCTF *Media Fellowship* yang diadakan bekerja sama dengan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Jakarta. Selanjutnya, ICCTF bekerjasama dengan GIZ, CDKN dan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan pertemuan forum investasi yang bertujuan menyeleraskan program berkelanjutan nasional, kebijakan, program (NAMAs) dengan Lembaga Keuangan Internasional untuk Perubahan Iklim dan *Clean Energy Finance* maupun investor lainnya. Pada tahun 2014, ICCTF berpartisipasi dalam Konferensi UNFCCC COP 20 di Lima. Selain itu, ICCTF juga berpartisipasi dalam Forum *USAID Adapt Asia Pacific Third Annual Forum 2014* yang bermitra dengan UNDP pada "*Strengthening Country Systems to Access and Manage Climate Change Adaptation Finance in Asia and the Pacific*".

Kemajuan

2.1 Partisipasi dalam Event Internasional

Eksistensi ICCTF di kancah nasional dan internasional telah meningkat melalui partisipasi aktif Sekretariat ICCTF dan kehadiran dalam *event* internasional. Bahan yang terkait dengan *outreach* ini termasuk newsletter, *booklet*, profil kegiatan, *fact-sheet* dan poster. Materi ini juga didistribusikan dan dibagikan selama *event* besar yang diselenggarakan di Jakarta, Kamboja, Malaysia dan pada COP 20 di Lima, Peru. Kegiatan event internasional yang diadakan adalah:

2.1.1 Partisipasi dalam UNFCCC Conference of the Parties (COP) 20 di Lima, Peru pada bulan Desember 2014.



Bappenas bekerjasama dengan ICCTF dan GIZ menyelenggarakan dua kegiatan paralel selama UNFCCC COP 20 di Lima, Peru. Acara pertama, berjudul 'Media dan Perubahan Iklim: Pembelajaran dan Praktik Terbaik', mempresentasikan kegiatan yang telah ICCTF lakukan dengan media untuk mempromosikan kesadaran publik tentang Perubahan Iklim. Dua dari empat pemenang ICCTF *Media Fellowship* yaitu dari Berita Satu TV dan Tempo berbagi karya dan pengalaman mereka mengenai pelaporan dampak perubahan iklim dan implikasi terhadap pembangunan. Acara paralel lainnya, berjudul 'Kerangka Mitigasi di Indonesia: Dari Komitmen Menuju Progress Implementasi', mempresentasikan hasil dan pembelajaran dari pelaksanaan aksi mitigasi di sektor kehutanan dan tata guna lahan (REDD +) serta sektor energi dan limbah. Acara kedua juga membahas jalan ke depan untuk kebijakan perubahan iklim di Indonesia serta kegiatan kedepan yaitu NAMAs, REDD + dan INDC.

2.1.2 ICCTF NAMA Summit : Iklim Investasi dan Pembangunan pada 12 September 2014



Pada 12 September 2014 , ICCTF bekerja sama dengan GIZ, CDKN dan Kementerian/ Lembaga menyelenggarakan forum investasi satu hari. Tujuannya untuk mempertemukan kegiatan nasional, kebijakan yang berkelanjutan, dan program (NAMAs) dengan lembaga pendanaan internasional untuk perubahan iklim dan *Clean Energy Finance* dari donor internasional dan investor lainnya. Forum Investasi ini menyajikan proposal kegiatan ICCTF NAMA / *pipeline program* serta *best practise* pada pembiayaan perubahan iklim. Banyaknya Pemangku kepentingan, pengambil keputusan dan *project developers* dari donor multilateral dan bilateral serta mitra pembangunan terkait dengan perubahan iklim, LSM nasional serta perwakilan dari sektor swasta hadir dalam acara tersebut. Bapak Witoelar, Staff Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, menyampaikan *opening remarks*, diikuti oleh pidato pembukaan dari Bapak Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta presentasi dari panelis terkait kegiatan NAMAs.

Setelah acara ini, beberapa pertemuan lanjutan berlangsung dengan potensial donor / mitra pembangunan yang ingin berinvestasi pada NAMAs. Selain itu, salah satu usulan kegiatan NAMAs (SEMEN NAMA) telah diterima oleh Program ADMIRE (*Adaptation Mitigation Readiness*). Program ADMIRE adalah kegiatan tiga tahun (2014-2016) yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Denmark dengan tujuan untuk pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi. Kegiatan ini bekerjasama dengan UNOPS dan the UNEP DTU Partnership.

Selama tahun 2014, ICCTF berpartisipasi di berbagai forum di seluruh Asia Pasifik. Pada tanggal 15-16 September, ICCTF berpartisipasi dalam USAID Asia – **Third Forum 2014: “Strengthening Country Systems to Access and Manage Climate Change Adaptation Finance in Asia and the Pacific”**. Staf senior ICCTF (Manajer Keuangan) menghadiri lokakarya dua - hari di Kamboja. Selain itu, Kepala Sekretariat ICCTF (Bappenas) juga

mempresentasikan pengalaman Indonesia dalam pembiayaan berbagai kegiatan terkait perubahan iklim.

Selain itu, ICCTF mengirim dua staf senior untuk berpartisipasi dalam Asia - Pacific Adaptasi Perubahan Iklim Forum 2014 Ke-4 yang diselenggarakan oleh Jaringan Adaptasi Asia Pacific (APAN) pada 1-3 Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam forum tersebut, ICCTF menyampaikan tiga kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi, antara lain, kegiatan 'Penguatan Sistem Iklim Informasi untuk Petani dan Nelayan' dan kegiatan 'Kerentanan Kesehatan : Penilaian, Pemetaan, dan Adaptasi Berbasis Masyarakat pada Penyebaran Demam Berdarah dan Malaria'.

2.2 *Community Outreach* ke Kabupaten Kepulauan Seribu



Pada bulan Agustus 2014, ICCTF telah melaksanakan program yang disebut 'Adopsi Karang untuk Anak Sekolah'. Dalam konteks program, serangkaian kegiatan yang dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI) - sebuah organisasi lokal yang mempromosikan konservasi terumbu karang dan kampanye tentang penyelamatan karang - karang dan adopsi karang terutama di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut : (i) pertemuan sosialisasi tentang perubahan iklim dan metode adopsi karang yang difokuskan pada lima **SMA** di Jakarta yang mengkhususkan diri dalam mata pelajaran kelautan dan perikanan; (ii) mengembangkan adopsi desain karang ; (iii) aktivitas perendaman Platform karang dengan mengundang khalayak yang lebih luas seperti siswa sekolah, guru, dan media.

Untuk mendukung kegiatan perendaman Platform karang, masyarakat nelayan setempat, JARMON menyediakan 10 bola terumbu karang transplantasi, dengan masing-masing bola karang yang terdiri dari 15 buah transplantasi karang dan 25 reruntuhan, dengan masing-masing puing-puing yang mengandung satu unit transplantasi karang dan 10 platform, dengan masing-masing platform yang memegang 16 lembar transplantasi karang.

2.3 Kunjungan Donor dan Media

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan kegiatan ICCTF kepada khalayak dan media yang lebih luas, ICCTF memfasilitasi dua kali kunjungan Donor dan Wartawan di lokasi kegiatan. Kunjungan donor dan media pertama diadakan pada bulan Juni 2014 di Bangkalan, Madura. Kunjungan ini bertujuan untuk mempresentasikan kegiatan Energi Biomassa dan *Industry Wood Pellet* ke audiens yang lebih luas dan *highlight* proses pelajaran. Lebih dari 30 perwakilan media, termasuk LKBN ANTARA, Tempo, Kontan, Jakarta Post, Jakarta Globe, dan Jawa Timur Televisi (JTV), anggota dari Jawa Pos Group dan perwakilan donor (UNDP, USAID , *Millennium Challenge Account Indonesia* (MCAI), *Climate & Development Knowledge Network* (CDKN), Kedutaan Denmark , dan GIZ)) berpartisipasi dalam acara ini .

Kunjungan kedua donor dan media dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13-14 November 2014 untuk melihat kegiatan “Penguatan Sistem Informasi Iklim untuk Petani dan Nelayan di Kupang”, bekerjasama dengan Perkumpulan Pikul, sebuah LSM yang berfokus pada kegiatan peningkatan kapasitas di Indonesia Timur. Selama kunjungan berlangsung, beberapa wartawan berpartisipasi dalam FGD untuk berdiskusi dengan para petani dan nelayan terkait kemajuan dan pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan. Mereka kemudian dibawa ke lokasi kegiatan di pantai Tablolong dan Pulau Semau, untuk melihat bagaimana para nelayan rumput laut mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut.

Para wartawan yang tergabung kunjungan berasal dari Harian Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia, Kompas TV, Berita Satu TV, Tempo, Pos Kupang dan Victory News.

2.4 Journalist and Media Award

Di tahun 2014, ICCTF terus melanjutkan *ICCTF Media Fellowship 2014* yang bekerja sama dengan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Jakarta dengan tujuan untuk mendukung media massa dalam mendidik masyarakat tentang perubahan iklim. Serangkaian kegiatan terkait dengan **Journalist and Media Award** telah selesai dilaksanakan dan ringkasannya disajikan di bawah ini :

(i) Diskusi Publik dan Peluncuran *ICCTF Media Fellowship* pada tanggal 7 Mei 2014 yang diadakan di Ruang Pertemuan Rosewood 3, Royal Kuningan Hotel, Jakarta. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk berdiskusi dengan calon penerima *Media Fellowship* tentang keseluruhan tujuan dari *ICCTF Journalist* dan *Media Award*.

(ii) *Journalist* dan *Media Award* 30 Mei 2014 .

Pemenang *ICCTF Media Fellowship Award* ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2014 di Kantor Sekretariat ICCTF di Jakarta, Indonesia. Sebuah komite seleksi yang terdiri dari Redaktur Senior dan Wartawan dari media nasional memilih 10 dari 61 proposal. Lima proposal dari Media Cetak; tiga proposal yang diterima dari Media online; dan dua dari televisi

dinominasikan untuk ICCTF *Media Fellowship* 2014. Di antara mereka, perwakilan dari tiga liputan media yang terbaik ditawarkan kesempatan untuk mengikuti UNFCCC COP - 20 di Lima, Peru .

(iii) Lokakarya Pertama di *Media Fellowship* pada Juni 2014

ICCTF dan AJI Jakarta mengadakan workshop yang pertama untuk 10 tim media yang datang dari seluruh Indonesia yang telah terpilih sebagai pemenang ICCTF *Media Fellowship* 2014. Lokakarya membahas beberapa topik yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, bagaimana energi dan efisiensi dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi perubahan iklim, dan bagaimana jurnalisme dapat bertindak sebagai saluran untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang perubahan iklim kepada masyarakat umum.

(iv) Upacara Penutupan ICCTF *Media Fellowship* 2014 dan *Launching* Buku “Media dan Perubahan Iklim” pada 13 Oktober 2014

Pada bulan Oktober 2014, ICCTF dan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Jakarta mengadakan pengumuman tiga tim teratas ICCTF *Media Fellowship* 2014 serta peluncuran buku yang berisi karya Media Fellowship. Acara dibuka oleh Bapak Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, perwakilan dari Danida, GIZ dan media. Sebanyak 100 peserta berpartisipasi dalam acara ini.



Tiga tim teratas yang terpilih adalah Tempo Yogyakarta, Media Indonesia Kalimantan Barat serta Berita Satu TV. Setelah pemberian sesi, ICCTF dan AJI meluncurkan buku yang terdiri dari karya-karya jurnalistik yang ditulis oleh rekan-rekan. Buku ini akan didistribusikan ke media nasional untuk mendorong pelaporan terkait perubahan iklim yang lebih banyak di masa depan.

Kontribusi Untuk Hasil Jangka Panjang

Partisipasi aktif ICCTF di event nasional dan internasional memperkuat peran dan visibilitas ICCTF sebagai lembaga pendanaan yang penting dalam kerangka kebijakan perubahan iklim di Indonesia. Kehadiran ICCTF di kancah regional dan global (yaitu COP 20) memberikan kontribusi terhadap penyebaran pembelajaran dan *best practices* mengenai pembiayaan perubahan iklim kepada para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Di luar peningkatan rekognisi dan publisitas, presentasi dan *sharing* pengalaman juga sejalan dengan tujuan ICCTF terkait peningkatan mobilisasi sumber daya. Dengan menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia, ICCTF memastikan tentang pentingnya mengkomunikasikan isu perubahan iklim bagi mereka yang terkena dampaknya.

3. Pengembangan Organisasi



Ringkasan

Pada tahun 2014, dasar hukum ICCTF yaitu Keputusan Menteri (Kepmen) ICCTF tentang Majelis Wali Amanat telah diterbitkan. Pedoman Tata Kelola sebagai pedoman bagi organ Lembaga Wali Amanat (LWA) ICCTF dalam melaksanakan tugas mengelola ICCTF juga telah ditandatangani oleh ketua MWA ICCTF. Telah dilakukan pula Penandatanganan MoU dengan Bank Mandiri sebagai Pengelola Dana Amanat (PDA). *Escrow account* untuk LWA ICCTF telah dibuat dan beroperasi penuh. Sekretariat ICCTF terus meningkatkan kapasitas staf melalui pemberian pelatihan *Results-based Monitoring* (RBM) dengan dukungan dari UNDP Indonesia.



Kemajuan

ICCTF telah menghasilkan pencapaian yang signifikan terkait dengan pembentukan legal basis Lembaga Wali Amanat (LWA), Majelis Wali Amanat (MWA) dan Pedoman Tata Kelolanya. Kepmen No.33/M.PPN/HK/03/2014 tentang Majelis Wali Amanat (MWA) telah diterbitkan pada bulan Maret 2014. Untuk mengakomodir perubahan struktur pemerintahan, pada bulan Oktober 2014, Kepmen ini telah direvisi dan diganti dengan peraturan baru seperti Keputusan Menteri Bappenas / PPN Nomor 97 / M.PPN / HK / 10/2014.

Pedoman Tata Kelola LWA ICCTF sebagai pedoman bagi organ LWA ICCTF dalam melaksanakan tugas mereka mengelola dan melaksanakan program-program ICCTF telah disahkan oleh anggota MWA dan ditandatangani oleh Ketua MWA pada awal November 2014. Sebelumnya, draft Pedoman Tata Kelola telah disosialisasikan sebanyak dua kali kepada anggota MWA untuk mendapatkan masukan dan *feedback*. Selain itu, draft Pedoman Tata Kelola juga telah disampaikan dalam pertemuan MWA yang berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2014.

Untuk memungkinkan transisi yang mulus dari PREP - ICCTF menuju *National Trust Fund*, pada tahun 2014 telah dilaksanakan perekrutan staf termasuk untuk posisi Direktur Eksekutif. Proses **rekrutmen posisi Direktur Eksekutif (DE)** melalui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia dimulai sejak Maret 2014. Dalam pertemuan MWA pertama yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2014, para anggota MWA menominasikan Noorsalam R. Nganro sebagai Direktur Eksekutif dan baru bergabung bersama ICCTF pada Agustus 2014.

Pada tahun 2014, Sekretariat ICCTF terus melakukan revisi **Rencana Bisnis 2014-2020** untuk mengatur visi jangka panjang. Revisi rencana bisnis telah dilakukan seiring dengan pengembangan strategi penggalangan dana, dan dokumen ini telah disampaikan kepada anggota MWA untuk mendapatkan tanggapan dan saran. Pada tanggal 3 Oktober 2014 Rencana Bisnis telah disahkan oleh anggota MWA .

Selama 2014, ICCTF menyelenggarakan dua kali **pertemuan MWA**. Pertemuan pertama berlangsung pada 27 Juni 2014 di Ruang Pertemuan Bappenas dengan tujuan untuk membahas hal-hal sebagai berikut: memperkenalkan anggota MWA tentang peran dan tanggung jawabnya; memperbarui kemajuan kegiatan ICCTF dan *milestone* untuk tahap transisi serta membuat keputusan penting yang terkait dengan Pengelola Dana Amanat (PDA), Direktur Eksekutif, Rencana Bisnis dan Pedoman Tata Kelola. Sebagai

hasil dari pertemuan tersebut, diputuskan beberapa hal berikut : (i) Penunjukan Bank Mandiri sebagai PDA (Pengelola Dana Amanat/*Fund Manager*); dan (ii) pencalonan Noorsalam R. Nganro sebagai Direktur Eksekutif dengan kontrak masa percobaan enam bulan. Pertemuan MWA kedua dilakukan pada 3 Oktober 2014 dengan tujuan untuk memperkenalkan Direktur Eksekutif yang baru terpilih kepada anggota MWA, menetapkan Pedoman Pelaksanaan MWA ICCTF, dan Rencana Bisnis ICCTF (2014 - 2020) serta menandatangani MoU dengan Pengelola Dana Amanah (PDA - Bank Mandiri).

ICCTF memperkuat sistem akuntansi keuangan dengan mengembangkan berbasis **Enterprise Resource Planning (ERP)** berbasis web yang akan menggantikan sistem pengawasan keuangan yang digunakan saat ini yaitu sistem Atlas UNDP di bawah kegiatan PREP-ICCTF. Untuk mendukung pelaksanaan ERP, serangkaian kegiatan dilakukan selama tahun 2014 termasuk diskusi tentang implementasi sistem keuangan ERP yang berlangsung pada bulan April 2014 dengan tujuan untuk mensosialisasikan sistem baru, diikuti dengan pertemuan lainnya seperti pertemuan singkat tentang sosialisasi sistem ERP yang bertujuan untuk memastikan bahwa staf ICCTF familiar dengan sistem serta mampu mengoperasikannya pada kegiatan sehari-hari. Sistem ERP untuk Sumber Daya Manusia Sistem Terpadu (HRIS) diluncurkan pada bulan Juli 2014. Beberapa penyesuaian tetap harus dilakukan oleh penyedia layanan (BataviaNet) untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem ERP setelah sistemnya diluncurkan.

ICCTF melanjutkan transisi dari PREP - ICCTF ke *National Trust Fund*. Kebutuhan untuk meningkatkan **kapasitas staf Sekretariat ICCTF** sangat penting. Pada bulan Juni 2014, UNDP menyelenggarakan pelatihan *Results-based management (RBM)*. Pelatihan selama tiga hari ini telah dilakukan sebagai tindak lanjut penilaian kapasitas UNDP untuk ICCTF di tahun 2012. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa staf ICCTF mampu mengadopsi standar terbaik dalam pengelolaan dan pengoperasian dana perwalian. Adapun tujuan dari lokakarya tersebut adalah: untuk memberikan pengetahuan kepada staf inti ICCTF dan pelaksana kegiatan ICCTF mengenai Manajemen Berbasis Hasil secara lebih mendalam melalui presentasi dan latihan serta menerapkan RBM dengan rencana bisnis yang ada, rencana kerja tahunan ICCTF, dan mempresentasikan kegiatan ke depan sesuai dengan SOP Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (PME).

Sebagai bagian dari upaya untuk **mendorong pertukaran informasi dan hasil pembelajaran** diantara para pihak terkait, ICCTF melakukan kegiatan peningkatan kapasitas melalui pengembangan isu perubahan iklim, termasuk *thematic Focus Group Discussion (FGD)*. ICCTF memfasilitasi FGD dengan tema: "Maksimalkan Potensi Informasi Mengenai Lokasi Ikan untuk Nelayan" dengan menargetkan kepada para pemangku kepentingan dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang berhubungan dengan isu-isu perikanan. Dengan menghadirkan narasumber diskusi yang merupakan perwakilan dari Balai Pengembangan Observasi Laut (BPOL) Bali, BPPT, Fakultas Perikanan

dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Fakultas Kelautan UNDIP Semarang. Selain itu, Sekretariat ICCTF juga menyelenggarakan serangkaian diskusi dan pertemuan bersama-sama dengan unit terkait di Bappenas dan kementerian/Lembaga (Kementerian Keuangan, Perbankan, dll) yang bertujuan untuk menyelesaikan prosedur standar operasi (SOP), pelaksanaan Pedoman Tata Kelola serta Mekanisme Penyaluran Dana.

Pembentukan **SATKER (Satuan Kerja)** berlangsung di akhir Desember 2014. Diharapkan bahwa SATKER sepenuhnya dapat berfungsi pada awal tahun 2015. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Anggaran telah menyetujui permintaan Kode Satker di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF). Adapun Kode Sakternya adalah 966010.

Kontribusi Untuk Hasil Jangka Panjang

Penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PPN/Bappenas tentang Majelis Wali Amanat ICCTF memungkinkan ICCTF untuk beroperasi secara independen dan menggunakan pelayanan dari Pengelola Dana Amanat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baru di masa depan. Hal ini juga menempatkan ICCTF di posisi yang tepat untuk menjadi platform implementasi RAN - GRK , RAN-API dan NAMAs.

Untuk menjadikan ICCTF sebagai organisasi yang transparan, kredibel, dan independen serta untuk mendapatkan pengakuan nasional dan internasional, ICCTF telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana strategis di tahun-tahun mendatang.

III. Tantangan & Respon

Kegiatan PREP - ICCTF menghadapi beberapa tantangan untuk mencapai target yang direncanakan pada tahun 2014 seperti yang disajikan dalam tabel di bawah

	Tantangan	Respon Manajemen
Strategic	Kepemimpinan dan posisi strategis ICCTF dipengaruhi oleh belum adanya Direktur Eksekutif dan staf tambahan yang belum direkrut	Setelah mendapatkan persetujuan dari Bappenas, Sekretariat mengiklankan posisi Direktur Eksekutif (DE) ICCTF. Iklan telah dilakukan sebanyak dua kali, namun pengumuman pertama belum menghasilkan shortlisted candidates yang memenuhi persyaratan. Selain itu, persetujuan calon DE baru terjadi pada pertemuan MWA pertama pada 27 Juni 2014.
	Keselarasannya yang kuat dengan inisiatif sejenis yang lain seperti tujuan strategis RAN -GRK dan RAN - API perlu ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.	Koordinasi kebijakan dan dialog kebijakan yang berkelanjutan, ICCTF memainkan peran penting dalam meningkatkan koordinasi dan keselarasan. Keterkaitan Sekretariat ICCTF dengan inisiatif dan kegiatan yang terkait dapat diperkuat setelah berkonsultasi dengan Bappenas
Institutional	Kebutuhan untuk meningkatkan sistem manajemen ICCTF yang meliputi: pelaporan, keuangan, komunikasi dan sumber daya manusia.	Sekretariat akan memperkuat kapasitas pelaporan dan komunikasi. Di Q2 2014, ICCTF Sekretariat merekrut sejumlah staf untuk mengisi posisi yang kosong termasuk PME Manager, PME Associate, Grant Assistant, Graphics Designer, Windows Asistants dan lain-lain .
Financial	ICCTF dan BAPPENAS perlu memprioritaskan penataan kegiatan penggalangan dana dan strategi untuk menghadapi kekurangan keuangan yang diperkirakan terjadi pada awal 2015.	Kegiatan penggalangan dana akan dilakukan oleh Direktur Eksekutif dengan dukungan Director of Fund and Finance. Strategi penggalangan dana telah diuraikan dalam Rencana Bisnis ICCTF 2014-2020 dalam rangka untuk memperkirakan dana yang masuk dari berbagai sumber, baik nasional maupun internasional.

IV. Cross Cutting Issues

Gender Mainstreaming

Proses pengarusutamaan gender dimasukkan ke dalam semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa kesadaran akan masalah gender dan menghormati kesetaraan gender tercermin di seluruh semua kegiatan. ICCTF memperhitungkan sensitivitas isu-isu gender dalam semua kebijakan, baik program, aspek administrasi dan keuangan organisasi. Pengarusutamaan gender merupakan bagian dari tujuan ICCTF dalam mengurangi dampak perubahan iklim dimana peran laki-laki dan perempuan juga dibedakan, karena laki-laki dan perempuan terekspos risiko yang berbeda .

ICCTF mendukung pengarusutamaan gender dan memperhatikan masyarakat yang terpinggirkan, seperti petani kecil dari komunitas hutan di Madura, dan petani kecil di lima lokasi kegiatan MoA yang secara aktif terlibat dalam kegiatan. Sebagai contoh, di kegiatan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan partisipasinya didominasi oleh relawan kesehatan perempuan setempat. Adanya keterlibatan kader lokal perempuan membuat implementasi kegiatan lebih 'dinamis'. Kader lokal dapat membantu tetangga dan masyarakat dengan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pentingnya hidup dalam lingkungan yang bersih dan jauh dari daerah perkembangbiakan nyamuk.

Keterlibatan kelompok perempuan di Pulau Rendra dan Toba, Kendari, Sulawesi Tenggara dalam program hibah skala kecil (SGP) budidaya rumput laut membantu para



petani perempuan tersebut dalam proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan memungkinkan mereka untuk meningkatkan mata pencaharian mereka serta dengan demikian dapat membantu lepas dari kemiskinan dan meningkatkan status mereka dalam masyarakat.

Kemitraan

Sekretariat mengintensifkan upaya bersama dengan **International Cooperation Jerman (GIZ)** melalui inisiatif baru yang didanai oleh untuk Kementerian Lingkungan, Konservasi Alam, Bangunan dan Keselamatan Nuklir (BMU) dari Jerman. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas yang ditawarkan oleh GIZ ke Sekretariat ICCTF. Secara paralel dan didanai oleh Pemerintah Jerman, *Expert* dari *German Center for International Migration and Development (CIM)* ditugaskan sebagai *Director Fund and Finance* sejak Oktober 2013. Staf *Expert* ini dapat berkreasi dan mencanangkan mobilisasi sumber daya serta strategi pendanaan untuk Sekretariat ICCTF untuk tahun 2015 dan seterusnya.

Pada tahun 2014, ADAPT Asia Pasifik - Program regional yang didanai USAID melalui AECOM memberikan bantuan teknis untuk pengembangan kerangka Monitoring dan Evaluasi untuk kegiatan adaptasi. Dukungan ini dimulai pada tahun 2013 dan kerjasama berakhir pada bulan Februari 2014. Kerangka ini digunakan untuk memilih proposal untuk program hibah skala kecil dan kegiatan dengan Kementerian/Lembaga.

Selama 2014, **Climate and Development Knowledge Network (CDKN)** memberikan dukungan kepada ICCTF dalam pelaksanaan ICCTF NAMAs summit. Kerjasama ini akan dilanjutkan dan diperkuat di tahun 2015. Melalui penyedia layanan/*service provider* yang terpilih untuk didanai oleh CDKN, ICCTF akan menerima bantuan teknis untuk meningkatkan pemahaman tentang ICCTF terkait kebutuhan kapasitas dan persyaratan teknis dalam mengakses Dana Perubahan Iklim Global, khususnya *Green Climate Fund (GCF)* dan bagaimana mengacu kepada standar internasional pengelolaan pendanaan Perubahan iklim. Kegiatan ini sejalan dengan upaya ICCTF untuk Menjadi *National Implementing Entity (NIE)*.

Bank MANDIRI telah ditunjuk sebagai Pengelola Dana Amanat (PDA) LWA ICCTF. Bank Mandiri akan menjadi pihak yang menerima dan memegang dana hibah dalam maupun luar negeri yang dikelola ICCTF dalam rekening-rekening yang dibuka untuk dan atas nama ICCTF. Bank Mandiri sebagai PDA memiliki tugas sebagai berikut : (i) membuka dan mengelola Rekening Rupiah; (ii) melakukan fungsi *trustee* dan agen pembayaran berkaitan dengan pendistribusian dan pengiriman Dana Titipan ke Rekening Tujuan; (iii) melakukan fungsi agen berkaitan dengan pengelolaan Dana Titipan.

Selain itu, ICCTF telah membangun kemitraan dengan **Aliansi Jurnalis Independen (AJI)** Jakarta untuk menyelenggarakan kegiatan ICCTF *Media Award*. Ketiga pemenang diundang untuk meliput kegiatan ICCTF di UNFCCC *Conference to the Parties (COP)* di Lima , Peru pada 1-12 Desember 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas ICCTF di antara para pengambil keputusan dalam negeri maupun luar negeri.

ICCTF juga menjalin **kemitraan dengan LSM lokal dan nasional serta perguruan tinggi** untuk melaksanakan program-program hibah skala kecil. Mereka adalah : (i) Perkumpulan PIKUL, Kupang; (ii) Aliansi Relawan UNTUK Penyelamatan Alam (ARUPA); (iii)



Humaniora; (iv) Politeknik ATMI Surakarta; (v) Perkumpulan Bingkai Indonesia; dan (vi) Institut Pertanian Bogor (IPB). Keenam organisasi yang mendukung ICCTF dalam melaksanakan kegiatan terkait perubahan iklim yang ditargetkan untuk kalangan bawah dan masyarakat di beberapa provinsi di Indonesia.

Royal Danish Embassy memberikan dukungan kepada ICCTF melalui **Environment Support Program Phase III (ESP3)**, dimana program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pertimbangan lingkungan dan metode. Kontribusi tersebut akan digunakan untuk lebih memperkuat proses seleksi kegiatan ICCTF dan pemantauan program di masa depan serta untuk memastikan pentingnya manajemen kegiatan. Dimungkinkan juga bahwa skema perjanjian diperuntukkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh perusahaan swasta, pemerintah daerah dan CSO. Majelis Wali Amanat (MWA) ICCTF melalui pertemuan rutinnya dapat membuat keputusan penting.

V. Manajemen Risiko

	Penilaian (Rendah, Menengah, Tinggi)	Strategi Mitigasi
Politik		
Reshuffle Kabinet dan penyesuaian kembali di beberapa lapisan instansi pemerintah termasuk Bappenas sehubungan dengan pemilihan Presiden 2014 .	Sedang	Pemilihan presiden baru dan implikasinya berada di luar kendali dari kegiatan PREP - ICCTF dan Sekretariat ICCTF. Namun, selama periode pemilihan presiden , ICCTF mengambil beberapa langkah-langkah termasuk membentuk kemitraan dengan Asosiasi Jurnalis untuk mempromosikan kepada publik pentingnya perubahan iklim dan peran ICCTF dalam mencapai target nasional mitigasi dan adaptasi.
Regulasi		
Penerbitan kerangka peraturan tentang pembentukan dan operasional MWA - LWA terjadi di kuartal empat 2014	Rendah	Melalui koordinasi intensif dan komunikasi dengan Unit terkait di Bappenas dan sebagai akibat dari peraturan baru - Keputusan Menteri Bappenas / PPN Nomor 97 / M.PPN / HK / 10/2014 tentang Majelis Wali Amanat ICCTF dikeluarkan pada Oktober 2014 .
Strategis		
Profil dari ICCTF untuk mengakses vertical fund seperti Adaptation Fund, dan Green Climate Fund belum mencukupi	Menengah	Prioritas telah dimasukkan pada pembentukan landasan hukum untuk sepenuhnya menjadi lembaga nasional. Setelah Kepmen MWA, ICCTF dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan dana vertikal. Akreditasi oleh Adaptation Fund Board tidak berhasil pada tahun 2012 dan belajar dari pengalaman ini Sekretariat mungkin ingin mencari akreditasi sekali lagi dengan peningkatan kapasitas dan status nasional. Adapun Green Climate Fund di Tahun 2014 masih terlalu dini untuk mempertimbangkan akreditasi ICCTF untuk mengakses dana vertikal ini; Namun, Sekretariat akan terus meningkatkan kapasitas untuk mengikuti perkembangan seputar vertical fund tersebut .

Operasional

SATKER tidak sepenuhnya beroperasi pada kuartal empat 2014 namun persetujuan pembentukan SATKER ICCTF terjadi pada 2014. ICCTF telah memiliki SATKER dengan kode nomor 966010

Menengah

Beberapa pertemuan berlangsung untuk membahas pembentukan SATKER termasuk belajar dari proses pembentukan SATKER Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI)

VI. Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan PREP-ICCTF pada tahun 2014 telah menghasilkan capaian yang sangat baik dan *best practices*. Pembelajaran yang disajikan di dalam laporan ini mencakup isu-isu kunci antara lain:

1. Koordinasi dengan para pemimpin lokal/masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan pada tahap awal sangat penting
2. Memiliki dasar hukum kerjasama dengan pemangku kepentingan setempat
3. Penilaian komprehensif dan intervensi pada peningkatan kesadaran masyarakat
4. Pentingnya menggunakan alat lokal untuk peningkatan kesadaran publik
5. Melibatkan media dalam serangkaian kegiatan dan sosialisasi program
6. Manajemen kegiatan yang terstruktur dengan baik
7. Menempatkan penekanan pada keberlanjutan dan strategi keluar yang tepat untuk program hibah skala kecil selama proses perencanaan
8. Tidak hanya stand-alone kegiatan' penyebaran informasi perkiraan cuaca
9. Pentingnya melakukan penilaian yang tepat sebelum memilih kelompok sasaran kegiatan dan lokasi kegiatan
10. Advokasi kepada pemerintah daerah
11. Kegiatan ini perlu diikuti oleh masyarakat setempat dan memberikan manfaat langsung kepada mereka

Rincian tentang pelajaran yang didokumentasikan selama pelaksanaan *funded projects* proyek hibah skala kecil disajikan di bawah ini:

1. Koordinasi dengan para pemimpin lokal/masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan pada tahap awal sangat penting

Proses pelibatan masyarakat sejak awal adalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Masyarakat tidak boleh dianggap atau diposisikan hanya sebagai sebuah 'objek atau penerima manfaat kegiatan', tetapi ikut menjadi pelaku penelitian. Masyarakat perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap kegiatan untuk mempermudah proses keterlibatan

di tingkat lokal. Selain itu, sangat penting untuk melibatkan para pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah desa, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terkait melalui rapat koordinasi dan dengar pendapat sebelum memulai kegiatan atau selama tahapan awal kegiatan. Kegiatan ini berguna untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi, situasi, dan latar belakang kegiatan untuk dapat diterima dan didukung, serta memastikan ketersediaan data atau informasi yang diperlukan untuk kegiatan. Miss-komunikasi dan kurangnya koordinasi dengan para pengambil keputusan dapat diminimalkan jika ada informasi yang jelas dan kepemilikan atas pengetahuan yang jelas terhadap keseluruhan desain kegiatan melalui pengarahannya serta pemberitahuan yang lebih awal.

2. Memiliki dasar hukum kerjasama dengan pemangku kepentingan setempat

Pembentukan dasar hukum kerja sama diantara pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan sangat penting. Dokumen dasar hukum atau 'perjanjian' akan dapat menjelaskan peran dan fungsi para pemangku kepentingan yang terlibat. Pengalaman dari program hibah skala kecil misalnya, pemetaan dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menghasilkan data yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Beberapa pertemuan yang diselenggarakan antara eksekutif, manajer PJU dan PLN untuk membahas hal-hal teknis (misalnya perhitungan, standar, dll) untuk mempersiapkan spesifikasi sistem informasi geographis yang memenuhi standar dari pihak yang berkepentingan.

3. Penilaian komprehensif dan intervensi pada peningkatan kesadaran masyarakat

Pelajaran penting yang diperoleh dari praktik ini salah satunya bersumber dari laporan kepala desa dan pimpinan masyarakat setempat ketika mengkomunikasikan berbagai pendekatan terkait peningkatan kapasitas masyarakat. Salah satu poin penting yang harus dilakukan oleh para praktisi kegiatan adalah untuk tidak perlu terburu-buru melaksanakan intervensi 'pendidikan masyarakat' tanpa terlebih dahulu mengkonsultasikan keseluruhan konsep kegiatan kepada calon penerima manfaat kegiatan. Untuk menjadikan mobilisasi sosial menjadi efektif, satu set bahan pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran harus dipersiapkan. Contoh konkret dan nyata harus dipersiapkan misalnya penggunaan dialek lokal untuk meningkatkan pemahaman konsep sulit seperti jenis ancaman dan bagaimana mereka harus mengelolanya. Hal ini penting untuk meminimalkan masalah dengan masyarakat, menghormati adat istiadat setempat dan cara-cara tradisional yang berlaku setempat.

4. Pentingnya menggunakan alat lokal untuk peningkatan kesadaran publik

Kadang-kadang sulit untuk menggunakan metodologi pendidikan dan kesadaran masyarakat di desa-desa dan daerah pinggiran kota, misalnya penggunaan megaphone daripada menggunakan mikrofon. Pedesaan dan perkotaan memerlukan sarana media yang berbeda untuk kampanye kesadaran. Diantaranya, pentingnya menggambar

peta dan menggunakan 'materi visual' seperti gambar interaktif dan poster. Selain itu, penerapan material lokal dan sumber daya dapat menjadi cara yang baik untuk memfasilitasi pembelajaran penduduk pedesaan. Pemetaan kebutuhan masyarakat misalnya bisa dilakukan secara paralel dengan gambar peta kertas dan memperoleh hasil yang lebih baik dan memperpanjang rentang perhatian peserta, termasuk menghemat waktu selama akuisisi belajar.

5. Melibatkan media dalam serangkaian kegiatan dan sosialisasi program

Melibatkan media dalam berbagai proses dalam kegiatan sangat penting. Media dapat memberikan masukan pada keseluruhan program dan dapat membantu untuk menyebarkan informasi tentang program yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi program dan praktisi media untuk mengalami proses elaborasi pembelajaran. Proses ini dilaksanakan oleh Pikul, Bingkai Indonesia dan Humaniora. Media memainkan peran penting dalam menilai program dan menyebarkan informasi secara efektif kepada masyarakat luas. Dari proses ini ICCTF mampu meningkatkan aktivitas belajar mereka. Informasi yang disebarkan oleh staf melalui media atau praktisi mendapat respon positif dari pihak lain, terutama sektor swasta dan pemerintah. Beberapa pihak menunjukkan ketertarikan untuk memperluas program ICCTF dan hal ini merupakan bagian pengembangan kelembagaan ICCTF dengan menarik mitra luar untuk pengembangan proposal bisnis di masa depan.

6. Manajemen kegiatan yang terstruktur dengan baik

Manajemen kegiatan dapat berjalan dengan mudah salah satunya dengan keteraturan "*Call for Proposal*" dan pengembangan proposal kegiatan. Memastikan keteraturan dan "*call for proposal*" yang dikomunikasikan dengan baik berkontribusi terhadap kualitas kegiatan yang didanai di kemudian hari dan dapat membantu dalam pengelolaan kegiatan, dalam hal mengantisipasi beban kerja dan tantangan yang muncul. *Well-funded operations* adalah prasyarat untuk stabilitas dan keteraturan operasi. Program hibah skala kecil (PHSK) 2015 akan menggunakan anggaran negara (APBN) untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan persiapan modalitas, mekanisme pencairan dan pelaporan. Pada saat yang sama kapasitas pelaksana kegiatan dalam mematuhi sistem APBN harus dipastikan.

7. Menempatkan penekanan pada keberlanjutan dan strategi keluar yang tepat untuk program hibah skala kecil selama proses perencanaan

Dalam seleksi program hibah skala kecil yang akan datang, keberlanjutan dan pengembangan strategi keluar harus dipastikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memobilisasi sumber daya dari pemerintah/masyarakat/swasta untuk mendukung kelanjutan kegiatan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kegiatan mengalami kesulitan untuk mencapai secara maksimal output kegiatan, dengan kepatuhan mekanisme pelaporan ICCTF - UNDP yang cukup 'rigid' dengan durasi kegiatan yang

singkat (6 Bulan). Oleh karena itu, perlu diberikan dukungan untuk pelaksana kegiatan dalam mengembangkan rencana kerja untuk memastikan hasil yang berkelanjutan. Sebagai contoh, Perkumpulan Bingkai telah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan nelayan, pemuda, remaja dan fasilitator lokal untuk memperkuat kapasitas petani dan nelayan meskipun dukungan dana dari ICCTF sudah berakhir.

8. Tidak hanya *stand-alone* kegiatan' penyebaran informasi perkiraan cuaca'

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi cuaca dan potensi ikan serta kegiatan lainnya sangat diperlukan oleh para nelayan dan petani mengingat kapasitas maupun kebutuhan masyarakat yang juga cukup beragam. Misalnya di empat lokasi kegiatan yang terkait dengan informasi cuaca ditemukan bahwa keterampilan tambahan diperlukan oleh nelayan untuk mengelola dan memasarkan ikan ketika tangkapan atau panen ikan berlimpah.

9. Pentingnya melakukan penilaian yang tepat sebelum memilih kelompok sasaran kegiatan dan lokasi kegiatan

Pemilihan kelompok sasaran dan lokasi dari program adalah dasar untuk mengidentifikasi metode yang tepat dan untuk kebutuhan intervensi program. Di daerah pesisir misalnya, nelayan memiliki beragam kebutuhan dan kapasitas. Jenis dan model yang diproduksi oleh "Alam" menentukan kebutuhan spesifik dalam merancang intervensi program. Studi kasus kegiatan Bingkai Indonesia di Pelabuhan Ratu, nelayan yang menggunakan perahu kecil dengan radius tangkapan ikan di kisaran kurang dari 2 km di laut memerlukan informasi lebih lanjut tentang besaran gelombang, pasang surut dan angin, bukan informasi tentang potensi ikan di lokasi tertentu. Tipe nelayan seperti ini memerlukan informasi cuaca harian, bukan mingguan. Namun, nelayan dengan kapal besar lebih membutuhkan informasi tentang lokasi potensi ikan yang melimpah di lokasi tertentu dan mereka memerlukan informasi mingguan bukan harian. Dalam kasus Pikul, petani rumput laut di Tablalong Kupang, informasi cuaca tentang pasang surut gelombang lebih berguna dari pada informasi harian. Selain itu bagi petani informasi mingguan lebih baik untuk merencanakan kegiatan penanaman rumput laut mereka.

10. Advokasi kepada pemerintah daerah

Harus ada intervensi dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mengangkat pentingnya sektor kelautan dan ekonomi masyarakat pesisir di wilayahnya masing-masing. Sektor pesisir dan kelautan masih diperlakukan sebagai isu yang terpinggirkan. Untuk meyakinkan pemerintah dan DPR, persiapan yang memadai diperlukan, termasuk kemampuan nelayan untuk menggambarkan berbagai masalah yang mereka hadapi, upaya yang telah mereka lakukan terkait dengan sumberdaya di masyarakat pesisir serta apa yang diperlukan dalam konteks perubahan iklim. Mereka perlu menyiapkan strategi advokasi bagi para pemangku kepentingan, khususnya untuk melibatkan pemerintah daerah dan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dipertimbangkan serta dapat ditangani.

11. Kegiatan ini perlu diikuti oleh masyarakat setempat dan memberikan manfaat langsung kepada mereka

Ini pelajaran dari penyebaran informasi tentang cuaca dan iklim di kalangan nelayan dan petani rumput laut. Pada awalnya nelayan dan petani rumput laut tidak mengetahui pentingnya informasi perkiraan cuaca. Namun, melalui pengiriman berkala informasi tentang cuaca oleh BMKG, nelayan dan petani rumput laut semakin mengerti bahwa informasi cuaca diperlukan untuk menghindari risiko dan menerapkan manajemen ikan yang tepat. Kebutuhan akan informasi bahkan lebih meningkat, tidak hanya informasi dalam bentuk 'teks' atau sms, tetapi juga informasi visual seperti peta saat ini, peta potensi ikan, dan peta dasar laut. Informasi cuaca secara keseluruhan tidak hanya berguna untuk nelayan, tetapi juga petani rumput laut.



VII. Kesimpulan dan Rencana ke Depan

- Proses transisi ICCTF dan pengaturan kelembagaan baru dari PREP-ICCTF menuju ke *National Trust Fund* yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 80/2011 tentang dana perwalian nasional telah berhasil diselesaikan.
- Bank Mandiri sebagai Pengelola Dana Amanat (PDA) telah dipilih dan berfungsi penuh untuk mendukung dana perwalian ICCTF.
- *Governance* ICCTF termasuk didalamnya *Standard Operating Procedure (SOP)*, Pedoman Tata Kelola ICCTF telah diselesaikan dan diadopsi oleh MWA untuk memungkinkan ICCTF dapat berfungsi secara penuh pada tahun 2015.
- Pembentukan Satuan Kerja (SATKER) telah selesai. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Anggaran telah menyetujui permintaan Kode Satker di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF).
- Pemerintah Indonesia (RI) melalui APBN 2015 menyediakan dukungan sebesar 15,3 miliar rupiah (USD 1,27 juta) untuk biaya operasional ICCTF dan pendanaan program hibah skala kecil (SGP). Selain itu, pada bulan Desember 2014, Kedutaan Denmark membuat kontribusi langsung ke ICCTF sebesar USD 65.000, dimana dananya diperuntukkan untuk lebih memperkuat proses seleksi kegiatan ICCTF di masa depan dan monitoring serta biaya operasional umum ICCTF sekretariat di tahun 2015.
- ICCTF terus memperkuat kelembagaannya melalui pengembangan *windows thematics (landbase, energy, resilience & adaptation)* dan memperluas penyampaian isunya ke masyarakat sipil melalui pelaksanaan program hibah skala kecil. Dengan demikian memberikan sarana kepada para pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional untuk mengurangi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
- ICCTF terus memperkuat kegiatan penggalangan dana untuk meningkatkan tambahan dana. Selama 2014, berhasil menyelenggarakan **ICCTF NAMA Summit** dengan dukungan dari Bappenas, GIZ dan CDKN dengan tujuan untuk menyelaraskan kebijakan nasional yang berkelanjutan, kegiatan dan program (NAMAs) dengan dana perubahan iklim internasional dan *Clean Energy Finance* dari donor internasional dan investor lainnya. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, beberapa diskusi bilateral dengan potensial donor yang menunjukkan minat untuk berinvestasi di kegiatan NAMAs telah diselenggarakan.
- ICCTF terus bekerja untuk membangun *project pipeline* NAMAs melalui pengembangan beberapa *concept note* dan proposal. Salah satu diantaranya adalah, ICCTF berencana untuk *scale-up* kegiatan *Biomass Energy* di Bangkalan, Madura sebagai bagian dari mempertahankan keberlangsungan kegiatan dan memastikan replikasi di masa depan. Konsep proposal yang dengan tema "**Sustainable Wood of Effective Energy Technology (SWEET) NAMA**" yang sebelumnya telah dipresentasikan di NAMAs Summit dan akan lebih ditingkatkan selama beberapa bulan kedepan bekerja sama dengan Kementerian dan mitra pembangunan. Selain itu ICCTF telah berhasil memfasilitasi pengajuan proposal kegiatan CEMENT NAMA ke ADMIRE (*Adaptation*

Mitigation Readiness) – kegiatan yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Denmark dengan kolaborasi antara *United Nations Office for Project Services* (UNOPS) dan UNEP DTU Partnership.

- ICCTF mulai mempersiapkan dokumentasi untuk keperluan aplikasi akreditasi sebagai *National Implementing Entity* (NIE) ke *Green Climate Fund* (GCF). Dalam upaya ini, ICCTF akan menerima dukungan melalui CDKN dan GIZ.
- ICCTF telah berhasil menyelesaikan fase transisi. Kegiatan ini diikuti dengan telah dikeluarkannya landasan hukum dan operasional sebagai *trust fund* yang dikelola secara nasional. Di tahun 2015, ICCTF akan terus menunjukkan kapasitasnya untuk mengelola dan mengumpulkan dana. Dengan demikian, secara bertahap akan meningkatkan visibilitas sebagai sarana penting untuk menyalurkan dan mengelola kontribusi dana perubahan iklim.

Dibawah ini adalah beberapa contoh kegiatan ICCTF yang telah dipublikasikan di media.

“Adaptasi Iklim Info Metereologi Turut Cegah Kerugian”

Kompas, Sabtu, 15 November 2014

JAKARTA, KOMPAS – Nelayan dan Petani sangat membutuhkan informasi metereologi yang mudah diakses, dipahami, dan cepat diperbaharui. Pengetahuan tentang kondisi cuaca, musim dan kondisi laut memastikan mereka menyiapkan diri lebih baik, termasuk mencegah kerugian ekonomi.

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, nelayan dan petani rumput laut menegaskan vitalnya informasi metereologi yang tepat. “Beberapa bulan lalu, tangkapan tuna nelayan meningkat berkat informasi potensi ikan,” kata Halidun (40), nelayan kelurahan Sulamo, Kabupaten Kupang, NTT, Jumat (14/11).

Halidun merupakan salah satu dari 1.084 peserta SMS Penting untuk Petani dan Nelayan (SMESTA) . Peserta program SMESTA menerima pesan singkat seputar informasi cuaca, termasuk peta potensi ikan di sekitar Kupang yang dikelola oleh LSM Perkumpulan Pikul.

Program yang didanai oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) selama Juli-November 2014 dengan cakupan wilayah Kota dan Kabupaten Kupang. Dananya Rp. 490 juta.

“sebelum ada SMESTA, saya hanya tahu info cuaca dari televisi. Terlalu umum,” kata Halidun. Ditambah informasi tempat berkumpulnya ikan, nelayan menghemat pengeluaran.

Selama ini menggunakan tanda alam untuk mencari ikan, yakni area berarus baik dan banyak lumba-lumba. Akibatnya, pengeluaran kerap membengkak karena nelayan harus berkeliling mencari area berkumpulnya ikan.

Halidun dan nelayan sekapal biasa mencari ikan bermodal Rp. 3 juta sekali melaut. Jika gagal menemukan ikan, pulang tanpa membawa hasil dan berutang kepada pemilik modal. “Dengan informasi peta potensi ikan, kami langsung menuju area tempat ikan berkumpul,” ucapnya.

Manfaat Smesta juga dialami Soleman Say (54), petani rumput laut di kampung nelayan Tablolong, Kupang. Informasi tentang cuaca buruk berupa gelombang tinggi dibutuhkan untuk menyelamatkan rumput agar tidak hanyut dibawa arus.

Sejumlah petani ladang pun memperoleh informasi SMESTA. Mereka bisa mengetahui awal musim hujan serta prakiraan hujan setiap bulan.

Soleman berharap program SMESTA berlanjut. “SMESTA selesai bulan November. Padahal saya harus mulai Desember,” katanya.

Terkait itu, Danny Wetangterah, Public Outreach Officer Pikul mengatakan keberlanjutan program tanggung jawab Pemerintah kota Kupang dan Kabupatean Kupang. “Tugas Pikul hanya sampai membuat prototipe (purwarupa;” (JOG).

“Berkah Kaliandra Berkat Pelet Kayu”

Antara News.com, Rabu, 25 Juni 2014 19:12 WIB
<http://www.antaranews.com/berita/440896/berkah-kaliandra-berkat-pelet-kayu>

Surabaya (ANTARA News) - Sarolan menenteng celurit seraya memamerkan jejeran pohon-pohon kaliandra merah (*Caliandra calothyrsus*) yang ia tanam di antara pohon jati dan sengon di lahan seluas 22 hektare miliknya.

Kaliandra merah merupakan jenis tanaman perintis yang mudah dan cepat tumbuh di lahan miskin hara, miskin air, dan bisa menyuburkan tanah melalui fiksasi Nitrogen dalam tanah.

Sarolan memotong salah satu pohon kaliandra merah dengan cerulitnya. Ia meninggalkan sedikit batang yang akan menjadi tunas. Tiga bulan lagi, tunas tersebut akan siap ditebang dan dijual.

“Awal menanam kaliandra merah ada keluhan juga kritik karena masih ragu apakah nanti bisa dijual. Tetapi sekarang justru banyak yang mau tanam juga bahkan ada yang menyesal kenapa dulu tidak ikut menanam,” kata petani asal Kecamatan Geger, Bangkalan, Madura, tersebut.

Wajah Sarolan berseri. Ia menunggu panen kedua meskipun baru mulai menanam setahun lalu. Ia tidak harus risau menunggu masa panen pohon jati yang lamanya 50 tahun dan delapan tahun untuk sengon.

“Panen pertama baru tiga mobil pick up, kalau total masih menunggu sekitar 65 mobil pick up,” ujar Sarolan.

Menurut Sarolan, pohon kaliandra merah dulu tidak berarti apa-apa, bahkan kayunya biasa dibuang dan daunnya untuk makanan ternak. Tetapi kini, kayu kaliandra merah adalah pundi-pundi uang.

Harga jual 1,5 ton kayu kaliandra merah mencapai Rp550 ribu. Warga di Geger tentu saja antusias karena menanam pohon kaliandra merah sangat mudah.

Setidaknya sudah ratusan petani dari Desa Kombang, Geger, dan Togubang yang menanam kaliandra merah di hutan rakyat Gerbang Lestari, yang luasnya 214 hektare dan disebut kebun energi.

Kaliandra merah kini menjadi berkah bagi mereka

karena bisa menambah penghasilan.

Kayu kaliandra merah menjadi bahan baku untuk pelet kayu (wood pellet) yang tengah dikembangkan di Desa Kombang.

Pabrik pelet kayu CV Gerbang Lestari dibangun dengan sumbangan dari donatur yang disalurkan oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dalam rangka menjalankan ekonomi rendah karbon dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Pelet kayu dari serbuk kayu merupakan bahan bakar berbasis biomasa yang dapat menjadi alternatif pengganti batu bara namun lebih ramah lingkungan karena emisi CO₂ yang dikeluarkan sangat rendah dan dapat diabaikan atau disebut carbon neutral.

Penerapan konsep carbon neutral melalui integrasi kebun energi kaliandra dan pabrik pelet kayu seperti di hutan rakyat Kecamatan Geger ini baru pertama kali dilakukan.

Hasilnya ternyata bukan hanya meningkatkan tutupan lahan pada areal kritis dan mengurangi emisi lewat penyerapan karbon, namun juga mampu meningkatkan ekonomi warga.

Petani yang menanam kaliandra merah tidak hanya memperoleh insentif ekonomi melalui penjualan kayunya, mereka juga bisa memanfaatkan daun kaliandra untuk makanan ternak serta usaha lebah madu yang bisa berlangsung terus menerus selama 15 tahun selama terubusan kaliandra merah tumbuh.

“Dulu kayu hanya dibuang tetapi dengan adanya pelet kayu ternyata bisa meningkatkan pemasukan karena kami bisa menjual kayu kaliandra ke pabrik untuk bahan baku pelet kayu. Pendapatan saya sekarang ada terus, kalau dulu kan musiman,” ujar Muhali, yang juga berdagang sembako.

Yang dibuang kini menjadi uang

Menurut penelitian Institut Pertanian Bogor, kaliandra merah merupakan bahan baku terbaik untuk pelet kayu.

Penelitian yang dilakukan atas permintaan Korea

Selatan itu menunjukkan, kaliandra merah lebih unggul dari pohon gamal, petai cina, dan sengon buton dalam segi laju pertumbuhan dan berat jenis yang lebih tinggi yang berpengaruh pada kadar abu yang lebih rendah. Umur kaliandra bahkan bisa mencapai 29 tahun dari sekali tanam.

Pemuka agama di Geger, Kyai Haji Irham Rofii, mengungkapkan menanam pohon pernah dianggap kafir karena alasan politik di Madura.

“Dulu di Geger sangat gersang sedangkan kalau musim hujan juga banjir. Sehingga kami berpikir kalau Madura begini-begini saja, orang Madura enggak akan kerasan (betah),” katanya.

“Tetapi dulu menanam kayu bisa disebut kafir, tidak sah shalatnya karena alasan politik. Setelah kyai mulai menanam, baru halal,” jelas Irham, pemimpin Pondok Pesantren Darul Ittihad.

Pengaruh kyai di Madura sangat besar. Irham mengatakan, ayahnya Kyai Haji Rofii adalah orang pertama yang membawa bibit rambutan ke Geger.

Irham yang juga gemar menanam pohon itu telah berhasil mengajak warga mengurangi lahan-lahan kritis sampai saat ini.

Ia juga diminta Kementerian Kehutanan untuk ikut studi banding mengenai pelet kayu yang kini mulai dikembangkan di Geger.

“Awalnya saya kumpulkan sepuluh kelompok petani andalan di sini lalu dibentuk 10 kelompok tani FMU Gerbang Lestari yang terdiri dari 30 orang untuk menanam kaliandra merah. Sekarang masyarakat mulai ikut tanam kaliandra merah bahkan sudah di luar kawasan binaan kami,” tutur Irham, yang juga melibatkan santrinya untuk mengurus koperasi Gerbang Lestari.

Berkat pelet kayu

Inkubator industri pelet kayu dari pabrik CV Gerbang Lestari baru menjalani uji coba sebulan namun pembeli maupun perantara pelet kayu lokal dan dari luar negeri sudah berbondong-bondong datang.

Pabrik yang terletak di Desa Kombangan di tengah-tengah hutan rakyat Gerbang Lestari itu

dirancang memiliki kapasitas satu ton per jam.

Dengan kapasitas tersebut dan jam kerja delapan jam sehari, akan dibutuhkan sekitar 12 ton bahan baku pelet kayu setiap harinya. Sementara harga jual pelet kayu Rp1,4 juta hingga Rp2,5 juta per ton.

Project Manager Daru Asycarya mengatakan para pembeli sudah berdatangan dengan permintaan mereka yang fantastis, salah satunya Korea Selatan yang sudah memesan 300 ton pelet kayu per bulan.

Namun, lanjut Daru, karena produksi mesin terbatas, maksimal menghasilkan sembilan ton per hari, maka permintaan pembeli tidak semua bisa dipenuhi.

“Pelet kayu adalah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dari batu bara. Beberapa pembeli datang dengan permintaan yang fantastis. Ini jadi pendorong masyarakat di sini untuk menanam kaliandra semakin banyak karena ini menjadi ikon,” jelasnya.

Pelet kayu memang bisa menjadi masa depan di Geger bahkan desa lainnya karena keuntungan pelet ditaksir mencapai Rp86.250.000 per bulan.

Kepala Sekretariat ICCTF Syamsidar Thamrin mengatakan pelet kayu dari serbuk kaliandra seharusnya menjadi kampanye nasional untuk memenuhi kebutuhan energi.

Pemasukan yang besar dari pabrik pelet kayu di Geger sudah menanti dengan banyaknya peminat namun masih membutuhkan tambahan mesin penunjang. “Masalahnya sekarang pembeli sudah siap tinggal pastikan mesinnya. Permintaan yang banyak belum bisa dipenuhi. Pelet kayu ini potensi besar dan mudah pengelolaannya,” ujar Syamsidar.

Ahli pelet kayu dan energi terbarukan dari Institut Pertanian Bogor Profesor Yanto Santosa menambahkan pelet kayu juga bisa digunakan sebagai sumber energi di rumah tangga untuk keperluan memasak.

“Bayangkan kalau tiap desa dan pulau-pulau terpencil punya industri pelet kayu untuk listrik, masak, dan lainnya jadi enggak perlu beli minyak di luar. Pemerintah harus berani menggunakan biomasa energi dengan wood pellet,” kata Yanto.

“Desa Terong, Desa Peduli Perubahan Iklim di Yogyakarta”

November 13, 2014

<http://www.mongabay.co.id/2014/11/13/desa-terong-desa-peduli-perubahan-iklim-di-yogyakarta/>

Dampak perubahan iklim telah dirasakan oleh semua orang di dunia, tidak terkecuali masyarakat Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dampak tersebut baik langsung maupun tidak langsung mengganggu kehidupan masyarakat. Seperti waktu penanaman lahan pertanian tidak bisa dipastikan, kondisi suhu udara tidak menentu ini dirasakan langsung oleh masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Terong secara sadar berusaha untuk berpartisipasi menangani dampak dan mengurangi terjadinya perubahan iklim. Oleh karena itu, mereka bersepakat untuk mendeklarasikan diri sebagai desa peduli perubahan iklim.

“Desa Terong diharapkan mampu menjadi bagian dunia untuk berkontribusi dalam pengurangan dampak pemanasan global dengan potensi hutan rakyat yang dimiliki dan perilaku masyarakatnya,” kata Lurah Desa Terong, Welasiman dalam acara peluncuran desa peduli lingkungan dan dan peluncuran koperasi Kelompok Tani Tunda Tebang “Jasema” pada Selasa Siang (11/11/2014) di Desa Terong, Bantul, Yogyakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bantul Sumarno, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Endah Murniningtyas yang juga merangkap Ketua Majelis Wali Amanat ICCTF dan Direktur Arupa, Dwi Nugroho.

Ia menambahkan, para pemilik hutan rakyat di Desa Terong sudah paham hutan berfungsi ekonomis, dan ekologis, khususnya sebagai penyerap karbon, sehingga mampu mengurangi dampak pemanasan global. Pengetahuan tersebut sangat penting, sebagai mitigasi perubahan iklim berbasis lahan.

Dari merasakan dampak perubahan iklim, masyarakat Desa Terong belajar tentang pemanasan global dan perubahan iklim, dimana hutan mampu menyerap karbon. Kegiatan menanam, pembuatan pupuk organik, serta pembentukan koperasi Hutan Tunda Tebang dibawah organisasi Kelompok Tani Hutan Tunda Tebang “Jasema” merupakan langkah nyata mengurangi dampak perubahan iklim.

Kelompok Tani Hutan Tunda Tebang “Jasema” memiliki modal Rp78 juta yang berasal dari tabungan masyarakat yang diharapkan mampu menahan penebangan pohon yang belum layak tebang. Penebangan pohon yang tidak layak tebang cukup tinggi di Desa terong, penebangan harus diminimalisir atau ditekan sekecil mungkin karena merugikan petani secara ekonomi, juga fungsi atau hutan sebagai penyerap dan penyimpan karbon akan hilang.

Pembentukan koperasi KTH Tunda Tebang Jasema mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui nilai kayu yang cukup tinggi karena pohon yang ditebang sudah masak dan fungsi pohon sebagai penyerap dan penyimpan karbon tetap terjaga.

“Kami berkomitmen agar hutan rakyat kami menyerap karbon sebanyak-banyaknya dan menyimpang selama-lamanya,” kata Welasiman.

Selain itu, komitmen dalam menyerap karbon dan mengurangi dampak perubahan iklim, Desa Terong membuat draf tata ruang desa, yang lebih memperhatikan keberadaan hutan.

Masyarakat Desa Terong telah mengetahui bagaimana menghitung karbon hutan rakyat, pengukuran, memasukkan data dan analisis data. Kegiatan pengukuran karbon dilakukan sejak tahun 2010 dengan 180 plot sample permanen, dan di monitoring setiap 2 tahun sekali. Hasilnya cadangan karbon hutan rakyat terus meningkat dari tahun ketahun.

“Kami berharap Pemerintah Bantul dan Bappenas terus mendukung kegiatan masyarakat. Hari ini juga Desa Terong mendeklarasikan sebagai desa peduli iklim. Deklarasi ini bukan akhir, namun langkah awal agar masyarakat Desa Terong bisa berkontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim kedepannya,” tutup Welasiman.

Sementara itu, Direktur LSM Arupa, Dwi Nugroho mengatakan setahun ke depan dirinya bakal menagih komitmen hijau dari lurah dan masyarakat Desa Terong. Lima tahun lagi Desa Terong harus masih hijau dan setiap dua tahun sekali ada penghitungan karbon di hutan rakyat.

Selama Arupa bekerja bersama Kelompok Tani Hutan Kasema, saat ini ada 27 pengurus KTH Jasema mampu menjadi pelatih menghitung karbon. Inisiatif deklarasi ini muncul dari masyarakat dan pemerintah desa. Permasalahan awal di Desa Terong yakni banyak masyarakat menebang pohon karena butuh biaya, namun pohon tersebut belum layak tebang.

Sehingga hadirnya Koperasi Tunda Tebang Jasema dengan anggota 554 Kepala Keluarga diharapkan bisa membantu masyarakat bukan memberatkan. Jaminan anggota koperasi meminjam uang yaitu pohon/kayu. Bunga koperasi sangat rendah. Sehingga dukungan masyarakat sangat dibutuhkan.

Koperasi berwawasan lingkungan ini berkomitmen memberikan pinjaman tunda tebang bagi petani hutan rakyat yang mengalami masalah ekonomi. Saat itu, Koperasi yang beranggotakan 554 orang ini telah mampu mengumpulkan modal sebesar Rp77.560.000. Hadirnya koperasi ini, diharapkan mampu menahan penebangan pohon 31,3 m³ atau setara dengan 9,58 ton karbon. Pada tahun 2021 KTT Jasema diperkirakan mampu menahan penebangan pohon 456,4 m³ atau setara dengan 140,22 ton karbon.

Penelitian Arupa tiga bulan lalu, di Desa Terong penemuan kebutuhan dari menebang kayu, sekitar Rp2,7 Juta/KK/Tahun. Penelitian ini dikelompok KTH Jasema, sehingga jika dikalikan nilai kayu yang ditebang sebesar Rp1,5 miliar/tahun. "Kondisi ini semakin memprihatinkan karena, sebagian besar pohon yang ditebang belum layak tebang dan masih berada pada usia produktif," kata Dwi Nugroho.

Desa Terong, yang mempunyai komitmen besar dalam aksi mitigasi perubahan iklim berupaya optimalisasi hutan rakyat dalam mitigasi perubahan iklim. Pemerintah Desa Terong, Kolompok Tani Hutan (KTH) Jasema, dan ARuPA bekerja sama dengan ICCTF (Indonesia Climate Change Trus Fund) telah melaksanakan program Peningkatan Serapan Karbon pada Hutan Rakyat Terong. Program ini berlangsung pada periode Juni-November 2014.

Program ini diturunkan dalam beberapa kegiatan, seperti penanaman 6000 bibit pohon, pembagian pupuk organik, perhitungan proyeksi cadangan karbon pada hutan rakyat, Pembentukan Koperasi Tunda Tebang (KTT) Jasema, Penyusunan rencana tata kelola hutan rakyat, dan penyusunan rencana

tata ruang wilayah desa Terong.

Output dari program ini membuahkan hasil yang positif. Desa yang mempunyai luas hutan rakyat 648 hektar (378 pekarangan dan 270 hektar tegalan ini, mampu menyimpan cadangan karbon sebesar 49,87 ton per hektar di tegalan dan 78,97 ton per hektar di pekarangan. Potensi besar ini perlu diimbangi dengan upaya mengurangi tindakan tebang tubuh yang membudaya.

Aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan Desa Terong merupakan aksi positif bisa menjadi role model bagi desa-desa lain di Kabupaten Bantul. Untuk itu ICCTF bersama ARuPA, Perangkat Desa Terong, dan KTH JASEMA bermaksud melakukan pencanangan desa Terong sebagai Desa Peduli Iklim.

"Fokus utama dari kegiatan ini adalah penandatanganan prasasti Terong sebagai Desa Peduli Iklim dan Penyerahan badan hukum Koperasi Tunda Tebang (KTT) JASEMA," kata Dwi Nugroho.

Wakil Bupati Bantul Sumarno mengapresiasi deklarasi desa peduli iklim. Pemanasan global menjadi fakta tidak terbantahkan baik ditingkat global dan lokal. Peningkatan pemanasan bumi menimbulkan dampak nyata yakni perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak pada perubahan ekologis yang besar bagi bumi. Iklim yang semakin panas mempengaruhi ketersediaan air dan meningkatkan kondisi cuaca ekstrim seperti badai dan kekeringan. Banyak petani yang merasakannya, seperti sulit memperkirakan waktu tanam. Permasalahan ini harus ditangani serius oleh semua pihak. Ini tanggung jawab kita bersama.

"Penebangan pohon merajalela, mengubah fungsi hutan menjadi lahan pemukiman, industri dan infrastruktur lainnya harus dibatasi secara hukum," kata Sumarno.

la menambahkan, hutan menjadi bagian penting bagi masyarakat yang hidup disekitarnya. Hutan bukan hanya sebagai habitat hewan dan tumbuhan tapi juga tumpuan hidup masyarakat. Hutan menjadi unsur vital bagi kesejahteraan masyarakat. Hutan menyediakan berbagai sumber daya untuk kepentingan manusia dan manusia berperan sebagai subyek pengelola.

"Kami mengapresiasi Desa terong atas

inisiatifnya mendeklarasikan sebagai desa peduli iklim. Semoga deklarasi ini bukan seremonial saja, namun komitmen pengelolaan hutan rakyat lestari yang nantinya berkontribusi dalam penurunan gas rumah kaca terus dilakukan," katanya.

Dalam hal ini masyarakat dapat menentukan strategi pengelolaan hutan yang strategis untuk diterapkan di wilayahnya, sesuai kemampuan biofisik lahan dan nilai sosial budaya setempat. Metode partisipatif diharapkan pengambilan kebijakan hutan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat lokal untuk diutamakan.

"Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan semakin menegaskan arah pembangunan hutan secara ideal dan tepat dengan dukungan pengalaman teknis masyarakat dilapangan. Ini menjadi investasi jangka panjang mewujudkan kesetaraan hak dan keadilan," tambahnya.

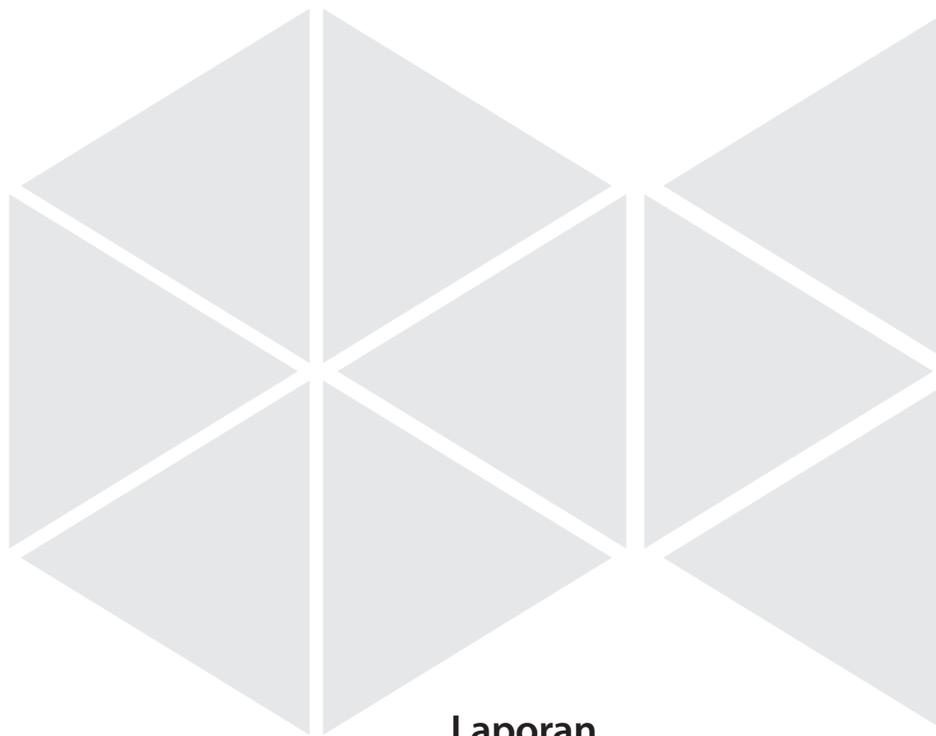
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas dan juga Ketua Majelis Wali Amanat ICCTF, Endah Murniningtyas mengatakan melalui mekanisme menunda penebangan dan penjualan alasannya untuk menaikkan harga karena usia pohon yang belum

cukup berimbang pada harga kayu murah. Selain itu, pemerintah pun tidak bisa berbuat banyak jika masyarakat tidak berkomitmen melakukan penundaan tebang dan membentuk desa peduli iklim. Ke depan hal-hal yang memiliki proses alami memiliki nilai jual yang lebih mahal seperti pupuk organik, bahan berwarna alami dan makanan organik.

"Hutan bukan berfungsi kayunya saja, apalagi untuk daerah kering, jika dijaga secara baik maka longdor tidak ada, bisa menahan dan menyerap air. Banyak di tempat lain, masyarakat menjual hasil bumi tergesa-gesa dan merugikan kita sendiri," kata Endah.

Dia berpikir masyarakat hutan rakyat Desa Terong bisa menanam kayu-kayu berdaya jual tinggi, seperti pohon Gaharu. Saya melihat dua tahun lagi Desa Terong berpotensi menjadi Desa Wisata dan budaya. Hutan lestari akan menjadi daya tarik wisata, karena negara maju sudah tidak punya hutan.

"Pak Presiden juga berkomitmen bahwa hutan masyarakat akan terus dilestarikan dan didukung. Dan Desa Terong beberap langkah lebih maju", tambahnya.



Laporan Tahunan 2014

Indonesia Climate Change Trust Fund

Sekretariat ICCTF
Wisma Bakrie II, 20th Floor
Jl. H.R Rasuna Said Kav, B-2, Jakarta
12920 - Indonesia
Tel: +62 (21) 5794 5760,
Fax: +62(21) 5794 5759
www.icctf.or.id

